



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Izntern
Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa
di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)**

SKRIPSI

**(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S.Ak
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Social Universitas Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

JURMAINI SELPIY

11970324361

JURUSAN AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: Jurnaini Selpiy
NIM	: 11970324361
PROGRAM STUDI	: S1 Akuntansi
KONSENTRASI	: Akuntansi Manajemen
FAKULTAS	: Ekonomi Dan Ilmu Sosial
SEMESTER	: IX (Sembilan)
JUDUL	: Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing)

**DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING**

Aras Aira, SE, M.Ak
NIK. 130 411 020

MENGETAHUL

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PROGRAM STUDI
S1 AKUNTANSI**

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jurmaini Selpiy
 NIM : 11970324361
 Jurusan : SI Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuansing)
 Tanggal Ujian : 17 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua
Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
 NIP. 19741108 200003 2

Penguji I
Dr. Jasmina Syafei, SE, M. Ak, Ak, CA
 NIP. 19750307 200701 2

Penguji II
Identiti, SE, M. Ak, Ak, CA
 NIP. 19690623 200901 2

Sekretaris
Sonia Sisca Eka Putri, SE, M. Ak
 NIP. 19940917 201903 2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jurmaini Selpiy
NIM : 0990324361
Tempat/Tgl. Lahir : Munsolo, 23 Mei 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

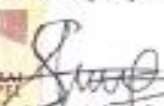
"Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Yang membuat pernyataan


METRAN TEMPEL
10000
JURMAINI SELPIY
NIM : 0990324361

*jika salah satu sanksi jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, TRANSPARANSI, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)

Oleh:

JURMAINI SELPIY
NIM: 11970324361

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi serta peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan anggota BPD dari 20 desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling berbasis – Partial Least Square (SEM-PLS) dengan alat analisis data Smart PLS 4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi dan peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil Uji R square menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 71,9%, sementara 28,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, Peran Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**THE INFLUENCE OF THE VILLAGE FINANCIAL SYSTEM,
GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, TRANSPARENCY, AND
THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS ON ACCOUNTABILITY OF
VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (EMPIRICAL STUDY ON
VILLAGES IN KUANTAN TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI
REGENCY)**

By:

JURMAINI SELPIY
NIM: 11970324361

This study aims to determine the influence of the village financial system, government internal control system, transparency and the role of village apparatus on the accountability of village financial management in villages in the Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This type of research is quantitative. The data used are primary data obtained from the distribution of questionnaires. The population of this study is all village officials and BPD members from 20 villages in the Kuantan Tengah sub-district. The sampling technique uses purposive sampling. The data analysis method used is Structural Equation Modeling based on – Partial Least Square (SEM-PLS) with Smart PLS 4 data analysis tool. The results of this research show that the village financial system, government internal control system, transparency and the role of village officials influence management accountability. village finances. The R square test results show that the contribution of all independent variables in explaining the dependent variable is 71.9%, while the other 28.1% is influenced by other factors outside this research.

Keywords: *Village Financial System, Government Internal Control System, Transparency, Role of Village Apparatus, Accountability of Village Financial Management.*

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, kemudahan, dan kasih sayang-Nya. Sebalawat beriringkan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, TRANSPARANSI, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Juran dan Ibu Doni Yuprida, yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik secara moril maupun materil tanpa henti kepada penulis. Kemudian untuk keluarga tersayang, Abang Tercinta Jupridon Rahmat dan Kakak tersayang Silvia Novariza serta seluruh keluarga besar baik dari pihak keluarga Ibu maupun keluarga dari pihak Bapak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth:

1. Bapak Prof. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr. Hj. Julina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri S.E, MSA, Ak, Ca selaku Sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Aras Aira S.E, M. Ak. sebagai pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak Dr. Nanda Suryadi, SE,ME selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberikan petunjuk dan nasehat selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Saudara yang tidak sedarah Miftahul Jannah dan Anser Agusta yang telah membantu dan menemani penulis selama melakukan penelitian.
11. Keponakan tersayang Arkana Farel Adelio dan Alana Anvira Malaika yang selalu menghibur penulis selama penyusunan skripsi.
12. Almarhum Pak Etek Syaipon Fa'at yang telah menginspirasi penulis dalam menemukan judul skripsi ini.
13. Sahabat sepermagangan Sekretariat DPRD Kuantan Sengingi Tri Septawela dan Wella Yufitri yang selalu memberi motivasi dan menasehati tanpa pernah menghakimi.
14. Sahabat seper-KKN-an Pulau Godang Ulfa Anggraini, Ela Ramadhani, Destriday Ifriana, Mira Wati, Septyani Saputri, Wulandari, Wulandasari, Al Furqon, Iqbal, Wido Purnama, Desri Ramadhan, Dan Ridho.
15. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 Lokal B dan teman-teman konsentrasi manajemen dan juga seluruh teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Ak.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan, tata bahasa maupun bentuk/ struktur ilmiahnya sendiri. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023

Jurmaini Selpiy

Nim: 11970324361

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penulisan.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 <i>Stewardship Theory</i>	17
2.2 Desa.....	18
2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	19
2.4 Sistem Keuangan Desa.....	26
2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	30
2.6 Transparansi	35
2.7 Peran perangkat desa.....	40
2.8 Pandangan Islam	43
2.9 Penelitian Terdahulu	44
2.10 Desain Penelitian.....	50
2.11 Pengembangan Hipotesis	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	57
3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data	57
3.3 Populasi dan Sampel.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60
3.5 Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel	60
3.6 Teknik Analisis Data <i>SEM-PLS</i>	64
3.6.1 Uji <i>Outer Model</i> atau Model Pengukuran	67
3.6.2 Uji <i>Inner Model</i> atau Model Struktural	69
3.6.3 Uji Hipotesis	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	71
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	71
4.2 Gambaran Umum Responden	72
4.3 Analisis Data.....	74
4.4 Uji <i>Outer Model</i> atau Model Pengukuran	81
4.4.1 Uji <i>Convergent Validity</i>	82
4.4.2 Uji <i>Discriminant Validity</i>	85
4.4.3 Uji Reliabilitas	87
4.5 Uji <i>Inner Model</i> atau Model Struktural	87
4.6 Uji Hipotesis	88
4.7 Pembahasan	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Keterbatasan	100
5.3 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

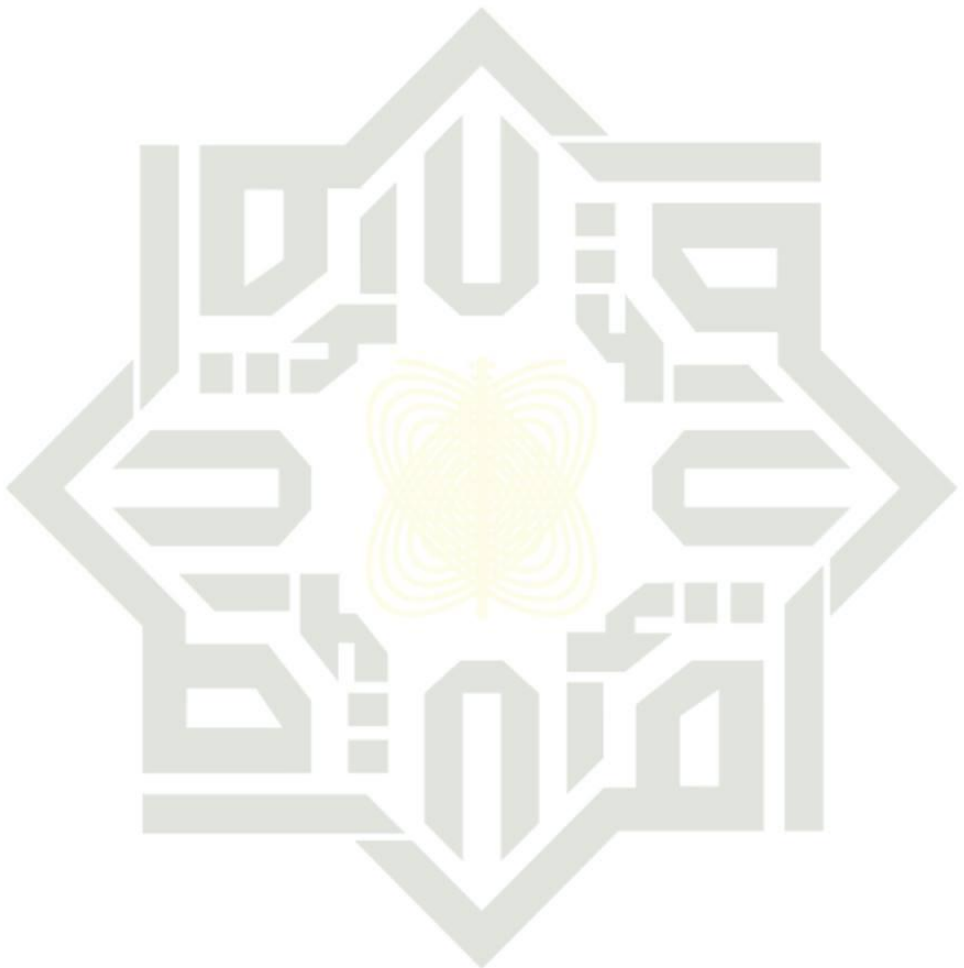
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	44
Tabel 3.1 Daftar Desa yang menjadi sampel penelitian.....	59
Tabel 3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen.....	61
Tabel 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen	62
Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data.....	72
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Jabatan.....	74
Tabel 4.5 Distribusi skor Jawaban Responden Untuk Variabel Sistem Keuangan Desa	76
Tabel 4.6 Distribusi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	77
Tabel 4.7 Distribusi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Transparansi	78
Tabel 4.8 Distribusi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Peran Perangkat Desa	79
Tabel 4.9 Distribusi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	80
Tabel 4.10 Loading Factor	82
Tabel 4.11 Average Variance Extracted (AVE)	84
Tabel 4.12 Cross Loading	85
Tabel 4.13 Nilai Composite Reliability dan Crombach's Alpha	87
Tabel 4.14 R Square.....	88
Tabel 4.15 Hasil Uji Hipotesis	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Desain Penelitian.....	50
Gambar 4.1 Skema Penelitian.....	81



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	Kuesioner Penelitian
LAMPIRAN 2.	Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
LAMPIRAN 3.	Hasil Pengumpulan Data
LAMPIRAN 4.	Karakteristik Responden
LAMPIRAN 5.	Uji <i>Convergent Validity Loading Factor</i>
LAMPIRAN 6.	<i>Average variance extracted (AVE)</i>
LAMPIRAN 7.	Uji <i>Discriminant Validity Cross Loading</i>
LAMPIRAN 8.	Uji <i>Reliabilitas</i>
LAMPIRAN 9.	Uji <i>Inner Model-R Square</i>
LAMPIRAN 10.	Hasil Uji Hipotesis
LAMPIRAN 11.	Skema Penelitian
LAMPIRAN 12.	Surat Izin Riset
LAMPIRAN 13.	Tanda Terima Kuesioner
LAMPIRAN 14.	Bukti Dokumentasi Pengeluaran Kas Dana Desa
LAMPIRAN 15.	Dokumentasi
LAMPIRAN 16.	Berita Terkait



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unit pemerintahan yang berinteraksi dan berhadapan langsung dengan masyarakat, desa berperan penting dalam mendukung kemajuan daerah dan masyarakat. Tidak hanya pemerintah pusat yang berkewajiban melaporkan kinerja pemerintah, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.), pemerintahan desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan desa, dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan pemerintahan yang anggotanya dipilih secara demokratis dan merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan daerah.

Dengan disahkannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.), diharapkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat dikelola secara efektif. Selanjutnya, (Peraturan Menteri Dalam Negeri , 2018), merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disiplin anggaran serta terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Kebijakan pemerintahan desa dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.), dianggap sebagai kebijakan yang memberikan harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Besarnya alokasi anggaran yang dilakukan desa, antara lain kebijakan, dimaksudkan untuk menaikkan anggaran.

Pada masa sekarang keakuratan dalam penerapan akuntansi keuangan desa masih diragukan, karena melihat fasilitas dan kemampuan perangkat desa yang masih rendah terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Terdapat masalah rendahnya administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem administrasi yang masih lemah serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan keuangan desa. Desa bisa mendapatkan keuntungan besar dari alokasi anggaran dana desa yang begitu besar untuk pembangunan, tetapi juga bisa menjadi bencana jika desa tidak mampu mengelola anggaran dengan baik dan bertanggung jawab.

Meski anggaran dana desa cukup besar, tidak menutup kemungkinan banyak terjadi kecurangan dan salah mengelola dana tersebut. Anggaran desa yang disalurkan oleh pemerintah akhir-akhir ini banyak disalahgunakan karena kurangnya pemahaman perangkat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa malah disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu (Muksin Hi Abdullah, 2019).

Di berbagai daerah di Indonesia, banyak kasus korupsi dana desa terjadi sejak peraturan diundangkan. Modus penyalahgunaan anggaran dana desa dapat terjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai bentuk, termasuk laporan palsu, penggelapan, pengeluaran berlebihan, dan penyuapan. Selain, niat kriminal, kurangnya pengetahuan dan pemahaman aparat desa tentang cara mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga dapat menjadi penyebab masalah keuangan.

Kasus korupsi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sejumlah kasus korupsi dana desa dari tahun 2015-2020, terdapat 676 orang oknum perangkat desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Pada tahun 2021, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa pemerintahan desa adalah lembaga pemerintahan dengan kasus korupsi yang terbanyak ditangani oleh APH tahun lalu, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian Negara sebesar Rp 233 miliar, disusul oleh sektor pemerintahan 50 kasus, sektor pendidikan 44 kasus, transportasi 40 kasus, social masyarakat 34 kasus (Dihni, 2022).

Kasus korupsi dana desa yang terjadi di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Tengah pada tahun 2016 yaitu pada Kepala Desa Sako. Beliau mengkorupsi anggaran pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan yang menyebabkan Negara menderita kerugian mencapai Rp. 576.652.000 (Cakaplah.com, 2020). Menurut Kepala Inspektorat Kuansing, ada temuan tahunan terkait pemanfaatan Dana Desa (DD) di Kuansing. Temuan ini berkaitan dengan kegiatan berbasis desa yang dibiayai oleh desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kepala desa yang melakukan penyelewengan dana desa tersebut berasal dari Kecamatan Kuantan Tengah tepatnya di Desa Sitorajo Kari (Datariau.com. (n.d.), 2022), seorang oknum kepala desa di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau menggelapkan dana bantuan tunai langsung (BLT) tahun 2022. Bahkan oknum kepala desa tersebut menggelapkan dana BLT selama 4 bulan (GoRiau. (n.d.), 2023)

Dari beberapa informasi yang dirangkum, salah satunya dari kepala desa kopah yaitu bapak Desko Putra mengatakan bahwa masih banyak terdapat beberapa permasalahan akibat kurang optimalnya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang bertugas dibidangnya. Permasalahan yang sering menjadi kendala bagi pemerintahan desa yaitu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa.

Selain itu, peneliti telah mengamati lokasi penelitian secara langsung. Observasi dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sudah diterapkan di desa sampel dan apakah terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Dari pengamatan tersebut peneliti memperoleh informasi bahwa desa-desa di Kecamatan Kuantan Tengah telah menggunakan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa dalam mengelola dana desanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan yang terjadi yaitu terdapat indikasi masih rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desanya. Salah satu bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah melainkan juga kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat : a) laporan realisasi APD Desa, b) laporan realisasi kegiatan, c) kegiatan yang belum selesai/atau tidak terlaksana, d) sisa anggaran, e) alamat pengaduan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, desa-desa di wilayah kecamatan Kuantan Tengah tidak menyampaikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desanya kepada masyarakat melalui media informasi sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara jelas tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena yang ada terdapat indikasi masih rendahnya akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Sistem informasi yang memadai dan adanya peran perangkat desa yang profesional menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan keuangan desa.

Pemerintah harus segera mengatasi maraknya kasus korupsi anggaran desa untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Agar dana desa tersalurkan dan dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan, pemerintah harus mampu melakukan investigasi secara menyeluruh tidak hanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di desa-desa yang teridentifikasi bersalah tetapi juga di desa-desa lain. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kontrol atas bagaimana kegiatan pemerintahan desa dilakukan, dan pemerintahan desa di setiap desa di Kecamatan Kuantan Tengah harus terbuka untuk mengurangi keparahan kejadian ini dan mencegah agar tidak terjadi lagi.

Korupsi merupakan perbuatan destruktif yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi banyak pihak. Hak-hak rakyat dan masyarakat dapat dilanggar akibat korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat pusat, bahkan pejabat daerah, khususnya di desa. Kecerobohan mereka juga memiliki efek negatif pada negara. Menurut temuan studi tahun 2016 yang dilakukan oleh (BPKP), faktor-faktor berikut menyebabkan kepala daerah melakukan korupsi: a. monopoli kekuasaan; b. lemahnya akuntabilitas; c. diskresi kebijakan; dan d. faktor tambahan.

Terjadinya Korupsi dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa dana desa belum dikelola dengan baik. Menurut sejumlah penelitian, akuntabilitas merupakan isu utama dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya pengawasan dan partisipasi masyarakat, ketidakmampuan perangkat desa untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, dan kompetensi mereka yang tidak memadai adalah masalah akuntabilitas.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan jawaban atas kepercayaan publik dan potensi untuk mengurangi terjadinya kecurangan. Pelaksanaan kewajiban pemerintah desa untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dan memberikan bukti kepada masyarakat bahwa pemerintah desa telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Ketersediaan pengelola dana desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, adil dan transparan dengan melibatkan masyarakat merupakan proses akuntabilitas pengelolaan dana desa (Hasniati, 2016).

Penerapan sistem keuangan desa diharapkan dapat menghentikan korupsi dana desa yang terus terjadi. Sistem keuangan desa terdiri dari catatan yang mencatat proses transaksi desa. Setelah itu dilakukan pencatatan dan laporan keuangan desa agar para pihak dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Novia Syahputri Saragih, 2019), menunjukkan bahwa sistem keuangan desa berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiansyah, 2020), yang menunjukkan bahwa Sistem keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut hasil penelitian (Gusti Putu Oka Surya Utama, 2018), sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muksin Hi Abdullah, 2019), menyimpulkan bahwa sistem keuangan desa belum berpengaruh positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Serta penelitian oleh (Duwi Agustina, 2020),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa (*siskeudes*) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan keuangan desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan standar pengendalian. Pemerintah pusat sudah memiliki sistem untuk melakukan pengendalian, yaitu pengendalian intern pemerintah. Sistem ini digunakan untuk memantau perangkat desa, dan diharapkan dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Penelitian (Rita Martini, 2019), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yesinia, 2018), yang menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian (Widyatama, 2022) dan penelitian (Martini, 2019), menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2019), yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

(Sari, 2021), transparansi merupakan gagasan pemerintahan yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Karena masyarakat sebagai pemilik dana desa harus menyadari transparansi dana yang digunakan pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa, transparansi sangat penting dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diharapkan pemerintah desa tidak dapat menyalahgunakan dana desa karena prinsip transparansi. Karena masyarakat sebagai pemilik dana desa harus menyadari transparansi dana yang digunakan oleh pemerintah desa, transparansi sangat penting untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diharapkan pemerintah desa tidak dapat menyalahgunakan dana desa karena prinsip transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Rasmini, 2019), menemukan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Umami & Nurodin, 2017) dan penelitian yang dilakukan oleh (Jaa et al., 2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun tidak sejalan dengan penelitian (Sari, 2021), yang membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perangkat Desa sebagai salah satu komponen pelaku desa memiliki peran penting dalam mengelola keuangan desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah pimpinan Kepala Desa. Dalam hal pengelolaan keuangan desa tentunya diperlukan perangkat desa yang dapat bekerja secara professional agar seluruh anggaran desa dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penelitian oleh (Setiana, 2017), membuktikan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut (Arfiansyah, 2020), dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan penggunaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih, 2019), (Yesinia, 2018), (Indrianasari, 2017), yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh, (Anggraeni, 2020), dan (Nainggolan, 2018), menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari, 2021), berjudul “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yaitu regresi linier berganda. Temuan dan pembahasan penelitian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem keuangan desa semuanya berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, transparansi tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian kembali tentang Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa karena karakteristik dan latar belakang masing-masing desa yang berbeda. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan oleh (Sari & Andra Asmara, 2021) “Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa di Kabupaten Aceh Tengah)”, menjadi dasar penelitian baru ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (i) variabelnya dengan penambahan variable independennya yaitu Peran Perangkat Desa. Alasan peneliti menambahkan variable Peran Perangkat Desa yaitu perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki desa. Kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 3 UU Desa. Pasal 48 dan 49 mengacu pada sifat, kedudukan, dan tanggung jawab perangkat desa (Novia Syahputri Saragih, 2019), alasan selanjutnya, karena penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2020), dan (Nainggolan, 2018), mengatakan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (ii) Objek penelitian, Penelitian ini dilakukan diseluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.

Pada penelitian sebelumnya, bahasan tentang sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi dan peran perangkat desa sudah banyak dilakukan. Namun banyak terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian dahulu. Pada penelitian Arfiansyah (2020) disimpulkan bahwa sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian Abdullah & Samad (2019) menyatakan bahwa sistem keuangan desa belum berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian yang dilakukan Artini & Putra (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Rasmini, (2019) disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Andra Asmara (2021) menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) menyimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) menyimpulkan bahwa peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengawasan agar dapat menjamin terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar dapat mencegah terjadinya tindak korupsi dana desa yang dapat merugikan Negara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi, dan peran perangkat desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Kuantan Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 di tahun berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi) ”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan singing?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Untuk mengetahui pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi dan peran dari perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi instansi terkait

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang bagaimana penerapan sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern, transparansi dan peran perangkat desa yang sama-sama berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang baik.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar peneliti membagi skripsi ini menjadi lima bab, dimana tiap bab dibagi dalam beberapa sub-sub bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian berikut membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian berikut membahas teori atau konsep yang digunakan, konsep akuntabilitas pengelolaan keuangan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian berikut membahas lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik mengumpulkan data, variabel operasional serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, serta saran yang diberikan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory*

Stewardship Theory merupakan komponen dari *Agency Theory*. Teori ini menjadi dasar penelitian ini. Menurut teori ini, manajemen tidak didorong oleh tujuan individu melainkan oleh hasil yang bermanfaat bagi organisasi. Menurut konsep *Stewardship*, manajemen bertanggung jawab kepada pemilik untuk mengelola kekayaan yang telah diberikan kepadanya. Manajemen berperan sebagai *steward*, sedangkan pemilik berperan sebagai *principal*.

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan filosofis tentang sifat manusia, yaitu pada dasarnya dapat dipercaya, mampu berperilaku tanggungjawab, dan jujur dengan pihak lain. Cara berpikir seperti ini menyiratkan bahwa suatu hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan sehingga manajer dipandang sebagai seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan publik.

Implikasi *Teori Stewardship* dalam penelitian ini, masyarakat berperan sebagai *prinsipal* dan pemerintah desa berperan sebagai *steward*. Dengan mengemban tanggung jawab dan menjalankan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa berfungsi sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan.

2.2 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.), selanjutnya disebut desa.

Menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah hukum dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan diakui. dihormati dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.), Tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa disebut juga dengan Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat desa disebut juga dengan Pemerintah Desa. Yang dimaksud dengan “staf” adalah asisten pemimpin dalam ilmu manajemen. Karyawan yang memiliki keahlian di bidangnya, bertanggung jawab, dan bertindak secara profesional dalam pelaksanaan tanggung jawabnya disebut sebagai "staf profesional".



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa tingkatan dalam struktur pemerintahan desa, masing-masing dengan bagiannya sendiri. Pemerintah pusat mempercayakan kepada pemerintah desa dengan tanggung jawab mengawasi masyarakat desa setempat dan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk kemajuan dan pembangunan desa. Seorang kepala desa, yang didukung oleh perangkat desa lainnya, bertanggung jawab atas setiap desa. Tanggung jawab dan fungsi masing-masing lini berbeda-beda.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Karena kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan amanah rakyat, maka masyarakat tidak hanya berhak mendapat informasi tentang pengelolaan keuangan desa, tetapi juga hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan dana desa yang telah dipercayakan sebagai pelaksanaan kewajiban kepala desa dalam rangka pencapaian tujuan desa. Akuntabilitas diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah desa, menjadikan pengelolaan dana desa sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat. Tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpangan dana desa akan berkurang akibat dari keyakinan tersebut, memberdayakan masyarakat desa menjadi masyarakat mandiri dana akhirnya desa mandiri.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan misi agar memiliki nilai akuntabel,
- 2) Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 3) Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- 4) Harus berorientasi pada visi, misi, hasil dan manfaat yang diperoleh
- 5) Memegang kuat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif

2.3.3 Dimensi Akuntabilitas

Terdapat empat dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran

Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan ditaatinya undang-undang dan peraturan lain yang dipersyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sedangkan Akuntabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejujuran (*accountability for frobity*) terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah tentang apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal sistem informasi akuntansi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan penentuan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dan apakah program lain memberikan hasil terbaik dengan biaya terendah.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan akuntabilitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, atas kebijakannya terhadap DPR/DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

2.3.4 Sumber pendapatan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah menyediakan dana untuk pelaksanaan keuangan pemerintah desa. APBD menyediakan dana bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah desa. Sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan uang tunai. Ketika uang tunai diterima atau ditarik dari rekening kas desa, cash basis mencatat transaksi tersebut.

Sumber Pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan desa meliputi: Hasil usaha desa, aset desa (seperti tanah kas, pasar, dan bangunan), swadaya, partisipasi, dan kerjasama dengan pihak lain.
- 2) Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 5) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 6) Pinjaman desa

Bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan merupakan APBDesa. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, draf APB Desa akan dibahas. Sesuai dengan peraturan desa, APB Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dan BPD. Jumlah desa yang digunakan untuk mengalokasikan dana pemerintah ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang dianggarkan dalam APD Desa adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses penerimaan dan pengeluaran Desa dimasukkan ke dalam rekening kas Desa pada bank yang dipilih oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan.

c. Penatausahaan

Sebagai pelaksana fungsi perbendaharaan, Kepala Keuangan bertanggung jawab atas administrasi keuangan. Dalam buku kas umum, setiap penerimaan dan pembayaran dicatat untuk administrasi. Setiap akhir bulan buku kas umum menutup pencatatan. Kepala Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:

- buku pembantu bank;
- buku pembantu pajak;
- buku pembantu panjar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pelaporan

Kepala desa wajib menyampaikan laporan pada saat mengelola keuangan desa. Bupati/Walikota dan BPD menerima laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Laporan yang dimaksud antara lain terdiri dari: 1) Laporan Pelaksanaan APB Desa; dan 2) Laporan realisasi kegiatan

e. Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Sesuai peraturan desa, laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan:

a) Laporan Keuangan yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi APD Desa
- Catatan atas laporan keuangan

b) Laporan realisasi kegiatan

c) Daftar program daerah, sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban dituangkan dalam laporan akhir tahun anggaran yang disiapkan oleh pemerintah desa. Selambat-lambatnya minggu kedua bulan April tahun berjalan, Bupati/Walikota harus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan laporan lengkap pelaksanaan APD Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Laporan pertanggungjawaban juga harus disebarluaskan melalui media informasi. Data yang disampaikan tersebut paling sedikit harus mencakup:

- 1) Laporan Pelaksanaan APD Desa
- 2) Laporan Penyelesaian Kegiatan;
- 3) Tugas yang belum selesai atau dilaksanakan;
- 4) Sisa Dana;
- 5) Alamat Pengaduan

2.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu Sistem Keuangan Desa (Arfiansyah, 2020), (Muksin Hi Abdullah, 2019), dan (Saragih, 2019), faktor selanjutnya yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Yesinia, 2018), (Arfiansyah, 2020), dan (Martini, 2019), faktor lainnya yaitu Transparansi (Sari, 2021), dan (Maju, 2020), dan faktor Peran Perangkat desa (Setiana, 2017), (Saragih, 2019), (Yesinia, 2018). Selain itu, terdapat juga banyak faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diantaranya yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Kepemimpinan Kepala Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa menjadi faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2.3.7 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Perumusan rencana keuangan
- 2) Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan
- 3) Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan
- 4) Pelaksanaan pelaporan keuangan

2.4 Sistem Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Sistem Keuangan Desa

Sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah sebuah aplikasi Keuangan Desa yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa yang merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces yang mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang masih awam sekalipun. Secara teknis, keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil yang cocok digunakan dalam aplikasi ini (Muksin Hi Abdullah, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014, pemerintah menetapkan pedoman dan standar penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa perlu diatur dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pemerintah Desa menunjukkan akuntabilitas keuangan desa. Laporan keuangan pemerintah desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) untuk mencapai akuntabilitas keuangan desa yang memadai. Setelah mendapatkan pertimbangan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) independen menyusun dan menetapkan SAPDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah. KSAP mengikuti prosedur uji tuntas standar saat menyiapkan SAPDesa. KSAP bertanggung jawab atas prosedur baku penyusunan SAP. Kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa yang semakin penting saat ini dengan adanya dana desa menjadi landasan dalam penyusunan SAPDesa.

Aplikasi Siskeudes adalah aplikasi yang berkonsep akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan tata kelola keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat sederhana, mudah digunakan, dan memiliki fitur-fitur yang Anda butuhkan. Mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dipermudah dengan aplikasi Siskeudes.

2.4.2 Dimensi Sistem Keuangan Desa

Dalam penelitian Arfiansyah, (2020) mengutip penelitian McLean dan DeLone (1992), menyatakan bahwa dimensi pengguna sistem dan pengaruh organisasi dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu sistem.

1) Dimensi Pengguna Sistem

Pemerintah desa sebagai pengguna sistem memperoleh pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan sistem keuangan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dapat membantu pemerintah desa mengelola keuangannya.

2) Dimensi Pengaruh Organisasi

Pemerintah Desa harus dapat memanfaatkan sistem yang sudah ada dengan sebaik-baiknya karena merupakan organisasi yang harus dapat mengontrol keuangannya. Pemerintahan desa memiliki kekuasaan yang besar, dan bertanggung jawab atas pembangunan desanya dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat pelaporan keuangan desa adalah sistem keuangan desa. Hal ini akan mampu menekan angka penyimpangan dan kecurangan dengan menggunakan pelaporan yang lebih akurat, terintegrasi, dan terkomputerisasi, sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih akuntabel.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Karakteristik Akuntansi Desa

Karakteristik Akuntansi meliputi:

1. Pengukuran, pengkomunikasikan, dan pengidentifikasikan informasi keuangan.
2. Akuntansi sebagai suatu sistem yang menerima data dan informasi sebagai masukan dan menghasilkan laporan keuangan.
3. Informasi data keuangan tentang suatu entitas.
4. Informasi yang disampaikan dengan pengguna selama proses pengambilan keputusan.

2.4.4 Aspek-Aspek Akuntansi Desa

Aspek akuntansi desa meliputi:

1) Aspek Fungsi

Akuntansi memberikan informasi kepada entitas seperti pemerintah desa, untuk mengambil tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut yaitu untuk melakukan pengawasan, perencanaan, dan membuat keputusan bagi pimpinan entitas yang dapat dimanfaatkan bagi pihak internal maupun eksternal.

2) Aspek Aktivitas

Suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi data, mengubahnya menjadi data yang relevan, dan kemudian menganalisis dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.5 Indikator Sistem Keuangan Desa

Variable Sistem Keuangan Desa diuraikan dalam beberapa indikator berikut:

- 1) Kemudahan dalam penggunaan
- 2) Resiko
- 3) Fitur layanan
- 4) Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi (Arfiansyah, 2020)

2.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP.

SPIP sebagai kontrol tata kelola untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai keandalan pelaporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, perlindungan aset, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi negara.

Untuk mewujudkan good governance dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, SPIP dikembangkan dalam rangka pengawasan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah harus dilaksanakan oleh pimpinan pemerintahan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama bagi semua orang, bukan hanya pimpinan satuan unit kerja terkecil. Selain berusaha membangun mekanisme administrasi, sikap dan perilaku pemerintah desa akan diubah dengan adanya sistem kontrol. Peraturan yang dikeluarkan tersebut menandai awal dari langkah-langkah perbaikan. Oleh karena itu, komitmen, keteladanan, dan niat baik seluruh komponen aparatur internal pemerintah desa menjadi sangat penting dalam pelaksanaan SPIP.

2.5.2 Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari:

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara lingkungan pengendalian yang mendorong perilaku positif dan memungkinkan penggunaan sistem pengendalian internal di tempat kerja melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- i) Penilaian risiko

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko yang harus dilakukan oleh pimpinan lembaga pemerintah terdiri dari hal-hal berikut: identifikasi risiko dan analisis risiko. Pimpinan lembaga pemerintah membuat penilaian risiko dalam konteks tujuan mereka yaitu mencakup pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dilakukan, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini kemudian harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan. Strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terpadu, rencana penilaian risiko, dan tujuan tingkat aktivitas, yang dipandu oleh undang-undang dan peraturan, dapat membantu lembaga pemerintah mencapai tujuannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian harus dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih harus disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
- f. Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi Dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dalam format dan waktu yang sesuai oleh pimpinan lembaga. Diperlukan komunikasi yang efektif atas informasi tersebut di atas, dan untuk itu, kepala instansi pemerintah sekurang-kurangnya harus:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi.
- b. Mengembangkan, mengelola, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5) Pemantauan

Sistem pengendalian intern harus diawasi oleh pimpinan instansi pemerintah. Pemantauan terus menerus, evaluasi terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil audit dan review lainnya adalah semua metode pemantauan sistem pengendalian internal.

2.5.3 Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan elemen SPIP diintegrasikan ke dalam kegiatan instansi pemerintah dan menjadi komponen penting. Menurut (Arfiansyah, 2020), terdapat 5 indikator yang telah digunakan baik dalam penelitian maupun praktik untuk mengukur sistem pengendalian intern. Indikator tersebut antara lain:

1. lingkungan pengendalian
2. penilaian risiko
3. kegiatan pengendalian
4. informasi dan komunikasi
5. pemantauan pengendalian intern



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Transparansi

2.6.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik harus bersifat terbuka, sederhana, dan mudah dijangkau oleh semua pihak yang membutuhkan, serta mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Publik memiliki akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi, khususnya mengenai hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah sesuai dengan tujuannya.

Transparansi merupakan salah satu prinsip good governance yaitu adanya keterbukaan dalam proses pengelolaan dana desa yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui serta bisa mengakses informasi dengan mudah tentang penyelenggaraan pemerintah, baik informasi tentang kebijakan, proses, pembuatan dan pelaksanaannya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa.

Transparansi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Sehingga dengan adanya transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui adanya akses yang memadai untuk mendapatkan informasi yang fakta dan akurat. Keterbukaan atau transparansi dapat di artikan sebagai tindakan yang memungkinkan suatu persoalan dapat menjadi jelas, serta mudah untuk difahami oleh kalangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tidak ada lagi permasalahan.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai keuangan desa serta informasi lain yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan oleh pemangku kepentingan. Informasi pemerintah harus jelas dan tidak diberikan secara tertutup atau rahasia. Masyarakat umum harus diberitahu tentang dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan prosedur perencanaan. Transparansi merupakan persyaratan bagi semua lembaga publik yang memiliki kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam rangka mengamankan dana rakyat dari penyimpangan seperti korupsi, transparansi dapat diartikan sebagai upaya pengawasan yang dilakukan terhadap segala tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

2.6.2 Indikator Transparansi

Indikator transparansi dalam model pengukuran penerapan Good Governance dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- 1) Salah satu cara untuk mencapai transparansi dan mencegah penipuan atau penyalahgunaan dana desa adalah dengan membuat dokumen dapat diakses. Masyarakat lebih mudah mengakses informasi baik berupa dokumen, gambar, maupun dokumen tertulis berkat ketersediaan informasi dan aksesibilitas dokumen. (Yalti, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi yaitu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keterbukaan pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan informasi secara transparan dan akurat kepada masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan dengan cara memasang pengumuman di papan informasi yang berisi jadwal kegiatan fisik maupun non fisik yang sedang dilaksanakan. Masyarakat serta aparat pemerintahan juga berhak mengetahui proses pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. (Yalti, 2020)
- 3) Adanya keterbukaan proses yaitu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat berhak mengetahui proses pengelolaan dana desa secara terbuka dan menyeluruh. (Yalti, 2020)
- 4) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi yaitu pengelolaan dana desa pada dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 bahwa tata pengelolaannya telah ditetapkan. Selain regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah juga harus membuat laporan rincian anggaran beserta dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan dalam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai dokumentasi.
(Yalti, 2020)

2.6.3 Karakteristik Transparansi

Dalam setiap tindakan, transparansi harus ditampilkan secara terbuka, siap menerima masukan dan kritik, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi. Dalam penelitian (Pebrianti, 2021) karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut:

1. *Informativeness* (Informatif) yaitu dalam memberikan informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan yang mengenai mekanisme kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi harus jelas dan akurat berdasarkan fakta.
2. *Openess* (Keterbukaan) yaitu adanya keterbukaan informasi merupakan hak yang harus diperoleh oleh *stakeholders* dalam mengakses informasi. Sehingga setiap *stakeholders* dapat mengakses segala informasi dan data secara menyeluruh dan akurat.
3. *Disclosure* (Pengungkapan) yaitu dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib merupakan segala sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawab berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mencermati dari karakteristik di atas, transparansi merupakan asas keterbukaan yang dapat memberikan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara lebih luas dan mudah mengenai data keuangan yang akurat. Maka dari itu transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pengelolaan dana desa. Sehingga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengakses informasi baik dari perencanaan sampai hasil yang telah dicapai.

2.6.4 Prinsip-Prinsip Transparansi

Dalam mewujudkan transparansi tentunya harus memenuhi beberapa prinsip. Humanitarian Forum Indonesia mengemukakan ada enam (6) prinsip dalam transparansi yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya informasi yang mudah dipahami serta dapat diakses mengenai informasi dana, cara pelaksanaan, proses pelaksanaan, serta bentuk bantuan atau program.
- 2) Adanya informasi yang dipublikasikan serta adanya media yang mengakses informasi mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- 3) Adanya laporan berkala yang disertai dokumen atau bukti mengenai pendayagunaan sumberdaya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum/publik.
- 4) Adanya laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh desa dan disertai dengan dokumen atau bukti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Adanya Website atau media yang digunakan dalam mempublikasikan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi desa.
- 6) Adanya Pedoman dalam melakukan penyebaran informasi

2.7 Peran Perangkat Desa

2.7.1 Pengertian Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa memiliki arti sejauh mana aparatur desa terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri No. 83 Tahun 2015, yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Perangkat Desa adalah pegawai di Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa membuat kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, serta pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa melaksanakan tanggung jawabnya. Seseorang yang menjadi anggota pemerintahan kepala desa disebut sebagai perangkat desa.

Sebagai salah satu komponen pelaku desa, perangkat desa berperan penting dalam memajukan bangsa melalui desa. Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan perangkat desa di bawah pimpinan kepala desa merupakan komponen unsur pemerintahan desa.

2.7.2 Struktur Perangkat Desa

Menurut Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Perangkat Desa terdiri dari:

- 1) Sekretariat Desa



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pelaksana kewilayahan
- 3) Pelaksana teknis

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh staf desa. Sekretariat desa paling banyak memiliki 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan sekurang-kurangnya 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (kaur).

Pelaksana Kewilayahan merupakan komponen pembantu Kepala Desa dan berfungsi sebagai satuan tugas daerah. Luas wilayah kerja, karakteristik, letak geografis, kepadatan penduduk, dan sarana prasarana pendukung tugas menjadi pertimbangan dalam menentukan Pelaksana Daerah, yang proporsional dengan jumlah pelaksana daerah yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa. Kepala Dusun atau berbagai sebutan lainnya bertugas dalam penyelenggaraan daerah.

2.7.3 Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Kepala desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan desa. Kepala desa bertindak dalam:

 - a) Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan APBDesa
 - b) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
- d) Menetapkan PPKD
- e) Menyetujui DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa, dan SPP

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBD .

3. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi melakukan tindakan yang menyebabkan anggaran dibelanjakan sesuai dengan tanggung jawabnya, menandatangani perjanjian kerja, dan menyusun laporan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan bertanggung jawab atas tugas perbendaharaan seperti menyusun, menerima, menyimpan, menyetor, membayar, mengelola, dan bertanggung jawab atas penerimaan dan distribusi APBDesa.

Sebagai salah satu komponen pelaku desa, perangkat desa berperan penting dalam memajukan bangsa melalui desa. Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan perangkat desa di bawah pimpinan Kepala Desa merupakan komponen perangkat desa dari unsur pemerintahan desa. Good Governance yang bercirikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokratis dan desentralisasi mensyaratkan penggunaan perangkat desa yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan masyarakat serta seluruh sumber daya yang dimiliki dengan baik.

2.7.4 Indikator Peran Perangkat Desa

Menurut penelitian (Nandea, 2019) Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel peran perangkat desa adalah:

- 1) Keterlibatan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa
- 2) Keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa
- 3) Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran
- 4) Keterlibatan dalam proses penatausahaan penggunaan keuangan desa
- 5) Ikut serta melakukan audit partisipatif

2.8 Pandangan Islam

Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Memberikan ancaman kepada orang-orang yang melakukan kecurangan yang artinya sebagai berikut (QS. Al Muthaffifin: 1-6):

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ ٢ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ ٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ٦

Artinya: “1). Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, 2).

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, 3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 4). Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5). pada suatu hari yang besar, 6).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.(QS. Al Muthaffifin: 1-6).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dilarang dalam melakukan kecurangan. Allah memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan (al-muthaffifin) dengan kalimat “wail” artinya celakalah, suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah al-muthaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Nanda sari & Jhon Andra Asmara (2021)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada desa di Kabupaten Aceh	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi. Variabel terikat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Tengah)	yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	pengelolaan keuangan desa sedangkan transparansi tidak berpengaruh
2.	Lusi Elviani Rangkuti dan Dwi Novasari (2019)	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Melati II Kecamatan Perbaungan)	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Perangkat Desa. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa memiliki hubungan yang signifikan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
3.	Tiwuk Puji,dkk (2021)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dalam Menciptakan Pemerintahan yang bagus	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan yang Bagus	Hasil Penelitian ini menunjukkan semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap Menciptakan Pemerintahan yang Bagus.
4.	Mufti Arief Afriansyah (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Keuangan Desa dan Pengendalian Intern Pemerintah	Semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pengelolaan Dana Desa	Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa	
5.	Indrianasari, (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilit As Pengelola N Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono)	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran Perangkat Desa. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan dalam seluruh pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri no. 113 2014.
6.	Muhammad Fatchuriza (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kemampuan Kinerja Perangkat Desa Terhadap kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	Variable yang digunakan adalah sistem keuangan desa dan kemampuan kinerja perangkat desa. Variable terikat yang digunakan adalah kinerja pemerintah desa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan desa dan kemampuan kinerja perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.
7.	Fifit Nur Walyati & Farida (2020)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi dan Sistem Pengendalian	Variabel bebas yang digunakan adalah Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, dan Sistem	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa SeKecamatan Muntilan)	Pengendalian Internal. Variabel terikat yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8.	Novia Syahputri Saragih & Denny Kurnia (2019)	Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
9.	Dian Lasmithasari Syam (2020)	Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Di Kecamatan Pattallasang Kabupaten Gowa	Variabel yang bebas yang digunakan adalah Sistem Keuangan Desa Variabel terikat yang digunakan adalah Kinerja Pemerintahan Desa	Semua variabel bebas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Novindra Dwi seiana dan Nur Layla Yuliani (2017)	Pengaruh pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel bebas yang digunakan adalah Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Variabel terikat yang digunakan adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perangkat desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan Pemahaman Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
11.	Pedro Wisang et al., (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Nita dan Desa Lusitada)	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Keuangan Desa dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel terikat yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Desa.
12.	Artini & Putra, (2020)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem	Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyajian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)	Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
13.	Jamaludin, (2020)	Pengaruh Peran Dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Depok	Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peran dan Pemahaman Perangkat Desa Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sedangkan Pemahaman Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sumber : Dari berbagai sumber yang diolah tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

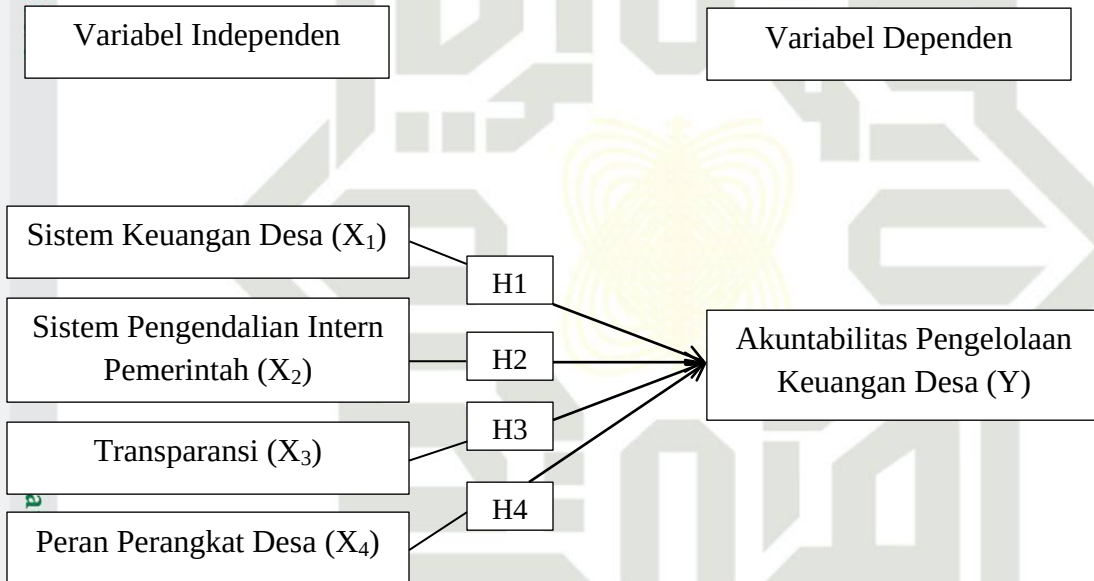
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Desain Penelitian



Gambar 2.1: Desain Penelitian

2.11 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan tentang sesuatu yang dianggap benar untuk sementara dan juga dapat dilihat sebagai solusi untuk suatu masalah. Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.11.1 Pengaruh Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

Sistem keuangan desa mencatat semua transaksi desa yang didokumentasikan dengan catatan, kemudian mencatat dan melaporkan keuangan desa sehingga para pihak dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan desa. Dengan diberlakukannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini akan memungkinkan desa untuk mempertanggungjawabkan dana atau anggaran yang digunakan dari desa. Pemerintah desa lebih mudah mencatat dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku ketika sistem keuangan desa digunakan.

Sistem keuangan yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemerintah desa. Terdapat pengaruh sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena dengan adanya sistem keuangan desa tersebut menjadi jawaban mengenai pengelolaan dana desa yang masih kurang ideal dan dengan adanya sistem keuangan desa ini juga dapat meminimalisir *fraud* dana desa. Semakin baik sistem keuangan desa tersebut, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan desanya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Saragih, 2019), (Arfiansyah, 2020), dan (M.Fatchuriza, 2020), menyatakan bahwa Sistem keuangan desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), menyatakan bahwa Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.11.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah suatu sistem yang dapat menjamin kepastian yang memadai mengenai pelaporan pengelolaan keuangan, perlindungan asset, dan kepatuhan terhadap peraturan diperlukan untuk tata kelola yang efektif dan akuntabel. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berfungsi sebagai pengawasan atas tanggung jawab fiskal. Proses perencanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban merupakan sarana implementasi SPIP di instansi pemerintah. Tujuan pelaksanaan SPIP adalah agar pemerintah pusat dan daerah mengelola keuangannya secara akuntabel dan terbuka. Akibatnya, pengelolaan keuangan dapat tunduk pada pengawasan publik.

Karena sistem pengendalian internal pemerintah desa berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan internal dan berimplikasi pada akuntabilitas, maka SPIP menjadi pertimbangan penting. Untuk memenuhi kriteria akuntabilitas desa dalam pengelolaan dana desa dapat diberikan kepercayaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cukup terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan dana desa akan terwujud jika pemerintah desa menjadikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan dengan baik dan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah desa telah melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2021), menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyatama, 2022), (Yesinia, 2018), (Martini, 2019), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap produktivitas akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.11.3 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah keterbukaan mengenai informasi yang diberikan kepada publik, dan publik dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Dengan adanya prinsip Transparansi memberikan pengawasan terhadap dana desa oleh pihak yang berwenang. Sehingga, penyerapan dana desa dilakukan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dana desa serta mampu meminimalisir terjadinya *fraud*.

Menurut (Sari, 2021) dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa, transparansi sangat penting. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka semakin transparan pemerintahan desa tersebut. Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai penggunaan dana desa saat mengelolanya agar jelas kemana uang yang diberikan oleh wali tersebut. Pemerintah desa juga dituntut untuk bersikap terbuka dan akuntabel terhadap segala kegiatannya.

Penelitian oleh (Putra, 2019), menyimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Umami, 2017), dan (Jaa, 2020), yang menyimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.4 Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Perangkat desa adalah seseorang yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa yang tergabung dalam pemerintah desa. Kinerja perangkat desa berhubungan langsung dengan kualitas pengelolaan keuangan desa, sehingga aparatur desa yang profesional menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, perangkat desa berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat desa yang profesional mampu memahami tugas pokoknya, terlibat dalam perencanaan dan penganggaran keuangan desa, serta mampu menyusun laporan keuangan desa dan mampu mematuhi norma yang berlaku. Karena akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan kinerja perangkat desa, maka perangkat desa yang mampu menjalankan perannya dengan baik dan mampu bekerja secara profesional akan memberikan pengaruh yang baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya peran perangkat desa diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Perangkat desa yang profesional sangat penting karena kualitas pengelolaan keuangan desa berhubungan dengan kinerja perangkat desanya juga.

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa peran perangkat desa memiliki hubungan yang signifikan dengan akuntabilitas suatu laporan keuangan



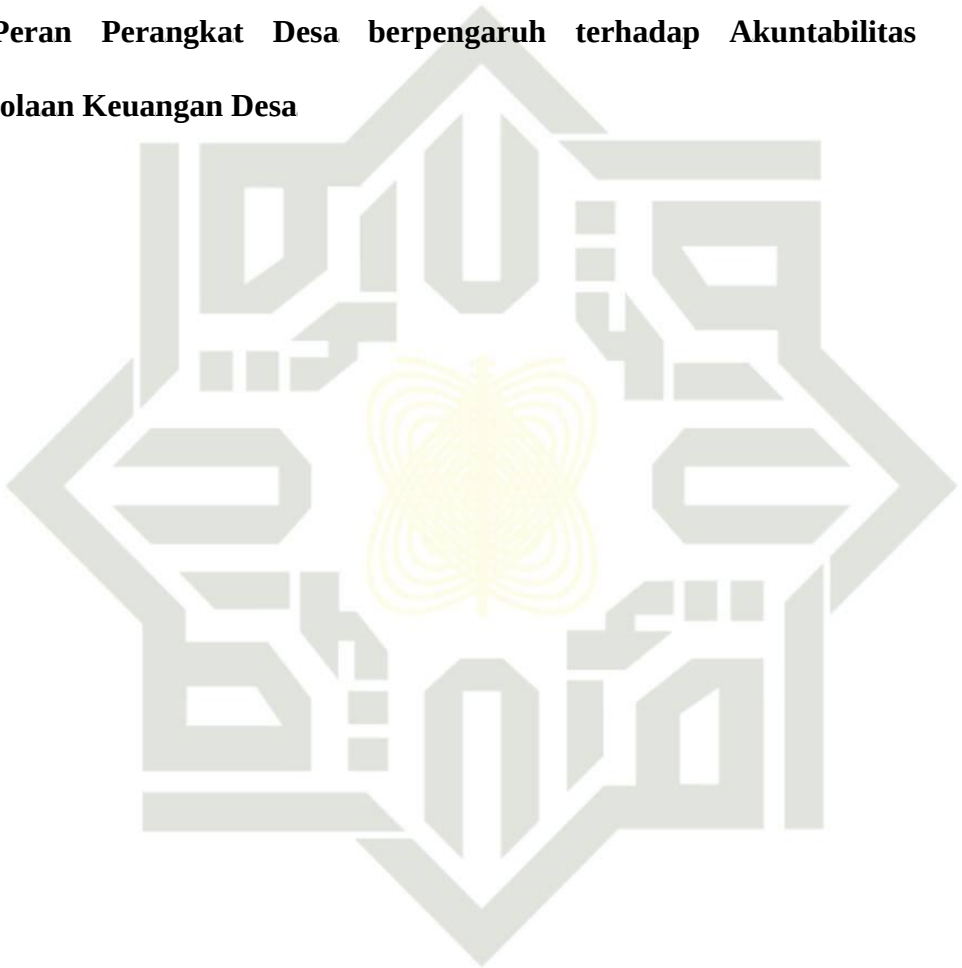
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Setiana, 2017), (Yesinia, 2018), dan (Saragih, 2019), yang membuktikan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa, dengan fokus pada penerapan Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagai bentuk pelaksanaan dari diterapkannya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Waktu penelitian ini adalah tahun 2023.

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual, dan akurat dengan menggunakan perhitungan matematis. Penelitian ini mengkaji pengaruh sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kuantan Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner. Teknik pengumpulan informasi digunakan untuk menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden melalui kuesioner.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi dan Sampel

Istilah “Populasi” mengacu pada kategori luas dari hal-hal atau orang-orang dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah dipilih oleh para ilmuwan untuk diselidiki dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa dan anggota BPD yang berasal dari 20 desa yang ada di Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Menurut Sugiyono (2015), sampel adalah komponen dari jumlah dan karakteristik populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah peran perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, adapun yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

- a) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa
- b) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), yang terdiri atas :
 - Sekdes (Sekretaris Desa)
 - Kaur keuangan / Bendahara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Anggota BPD sebagai pengawasan kinerja kepala desa

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka terdapat 8 orang sampel penelitian dari masing-masing desa. Karena mereka umumnya terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa, selain itu mereka lebih mengetahui segala kegiatan dan persoalan akuntabilitas.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 desa, dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekdes, Bendahara, dan Anggota BPD pada masing-masing desa sehingga responden berjumlah 160 orang.

Tabel 3.1
Daftar Desa yang menjadi sampel penelitian

No.	Nama Desa	Total Sampel/Desa
1.	Munsalo Kopah	8
2.	Titian Modang Kopah	8
3.	Jaya Kopah	8
4.	Kopah	8
5.	Koto Tuo Kopah	8
6.	Pulau Baru Kopah	8
7.	Bandar Alai Kari	8
8.	Koto Kari	8
9.	Pintu Gobang Kari	8
10.	Pulau Godang Kari	8
11.	Sitorajo Kari	8
12.	Pulau Banjar Kari	8
13.	Seberang Taluk	8
14.	Seberang Taluk Hilir	8
15.	Pulau Kedundung	8
16.	Pulau Aro	8
17.	Sawah	8
18.	Koto Taluk	8
19.	Beringin Taluk	8
20.	Jake	8
Jumlah Sampel Keseluruhan		160



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Data yang diolah tahun 2023

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan.

1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana responden diberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab. Kuisisioner (quissionare) adalah jenis pertanyaan tertulis dimana responden akan mencatat tanggapan mereka, biasanya dalam bentuk alternatif yang jelas (Sekaran & Bougie, 2017).
2. Studi pustaka adalah jenis penelitian teoretis yang melihat literatur, pendapat ahli, jurnal, dan penelitian sebelumnya tentang masalah yang diteliti.

3.5 Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa merupakan variabel dependen penelitian ini. Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan skala likert skor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Dependen

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
1	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, serta pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan Masyarakat. (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019)	1. Akuntabilitas 2. Pengendalian intern pemerintah 3. Transparansi 4. Sistem Keuangan Desa. 5. Kepercayaan Sumber : (Arfiansyah, 2020)	Skala likert

Sumber: Penelitian (Arfiansyah, 2020)

2. Variabel Independen

Sistem Keuangan Desa, Pengendalian Internal Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa merupakan empat variabel independen dalam penelitian ini. Skala Likert digunakan untuk mengukur variabel sistem keuangan Desa, transparansi, pengendalian intern oleh pemerintah, dan peran perangkat desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.3

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Independen

No.	Variable	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
1.	Sistem Keuangan Desa (X_1)	Sistem keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa. Setelah itu dilakukan pencatatan dan laporan keuangan desa agar para pihak dapat menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan desa. (Malahika et al., 2018)	1. Kemudahan dalam penggunaan 2. Resiko 3. Fitur layanan 4. Pemanfaatan penggunaan perangkat lunak aplikasi. Sumber : (Arfiansyah, 2020)	Skala likert
2.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_2)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang tidak terpisahkan dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang wajar	1. Lingkungan pengendalian 2. Resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. pemantauan. Sumber: (PP No.60 Tahun 2008) dalam (Arfiansyah, 2020)	Skala likert



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.(Martini, 2019)		
3.	Transparansi (X ₃)	Transparansi merupakan gagasan keterbukaan pemerintah dan pertanggungjawaban atas tindakan masa lalu. Karena masyarakat sebagai pemilik dana desa harus menyadari transparansi dana yang digunakan oleh pemerintah desa, transparansi sangat penting untuk akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sukmawati & Nurfitriani, 2019)	1. Keterbukaan Pemerintah 2. Tanggung Jawab Sumber: Aprilya & Fitria (2020)	Skala likert
4.	Peran Perangkat Desa (X ₄)	Menurut Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa adalah pegawai di Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa membuat kebijakan dan	1. Terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa 2. Terlibat dalam pengelolaan keuangan desa 3. Terlibat	Skala likert



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mengkoordinasikan pelaksanaannya, serta pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa melaksanakan tanggung jawabnya. Masyarakat dan seluruh kekayaannya harus dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh perangkat desa, yang demokratis dan terdesentralisasi (Good Governance). (Rindorindo et al., 2021)	dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa 4. Terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa 5. Ikut serta melakukan audit. Sumber: (Nandea, 2019)	
--	--	---	--	--

Sumber: (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008) dalam penelitian (Arfiansyah, 2020) dan Penelitian Aprilya & Fitri (2020)

3.6 Teknik Analisis Data *SEM-PLS*

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (*SEM-PLS*) dengan alat analisis data SmartPLS 4.0. Model persamaan struktural (SEM) adalah metode untuk analisis multivariate yang menggabungkan analisis faktor dengan analisis jalur secara bersamaan menguji dan memperkirakan hubungan antara variabel eksogen dan endogen multipel dengan banyak faktor.

Sistem keuangan desa, sistem pengendalian intern pemerintah, transparansi, dan peran perangkat desa merupakan 4 variabel eksogen (*variabel independen*) dalam penelitian ini 1 variabel endogen (*variabel*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dependen) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Karena indikator yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reflektif, maka arah hubungan sebab akibat antara konstruk dengan indikatornya berlawanan arah.

Model analisis jalur variabel laten dalam PLS terdiri dari:

- a. Merancang Pengukuran Model (*Outer Model*), dikenal juga sebagai (*outer relation atau measurement model*) mendefinisikan bagaimana hubungan setiap blok indikator dengan variabel latennya.
- b. Merancang model struktural, juga dikenal sebagai (*inner relation, structural model dan substantive theory*) adalah proses menggambarkan hubungan yang ada antara variabel laten. *R-square* digunakan untuk mengevaluasi model struktural.
- c. Menggambar diagram jalur. Dalam menggambar diagram jalur (*path diagram*), Falk dan Miller (1992) merekomendasikan untuk menggunakan prosedur nomogram *Reticular Action Modeling* (RAM) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Konstruk teoritikal (*theoretical constructs*) yang menunjukkan variabel laten harus digambarkan dengan bentuk lingkaran atau bulatan elips (*circle*).
 - 2) Variabel *observed* atau indikator harus digambarkan dengan bentuk kotak (*squares*).
 - 3) Hubungan-hubungan asimetri (*asymmetrical relationship*) yang digambarkan dengan arah panah tunggal (*single headed arrow*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Hubungan-hubungan simetris (*symmetrical relationship*) yang digambarkan dengan arah panah double (*double headed arrow*).
- d. Melakukan Estimasi. Estimasi parameter pemodelan SEM dengan pendekatan PLS diperoleh melalui proses literasi tiga tahap yaitu sebagai berikut :
 - 1) Tahap pertama, menentukan estimasi bobot (*weight estimate*) untuk menetapkan skor atau menghitung data variabel laten
 - 2) Tahap kedua, menentukan estimasi jalur (estimasi untuk *inner dan outer model*) yang menghubungkan antar variabel laten dan estimasi loading antara variabel laten dengan indikatornya.
 - 3) Tahap ketiga, menentukan estimasi rata-rata dan lokasi parameter untuk indicator dan variabel laten.
- e. Melakukan evaluasi *goodness of fit*. *Goodness of fit* model struktural dievaluasi dengan melihat nilai koefisien parameter dan nilai R yang diperoleh untuk masing-masing variabel laten dependen, dengan interpretasi yang sama dengan regresi. (Ulum et al, 2014)
- f. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menguji hubungan antar variabel.

Dalam menganalisis data, terhadap data yang diperoleh penulis juga menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yang dimaksud untuk menjelaskan secara terperinci mengenai variabel penelitian yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh dan menghubungkan dengan teori-teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang relevan dengan permasalahan yang kemudian dapat diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2015).

Menurut Monecke & Leische dalam Alfa, dkk (2017) SEM dengan PLS terdiri dari tiga komponen, yaitu untuk mengubah data hasil kuesioner menjadi data kuantitatif maka dilakukan penskoran menggunakan skala ordinal dari likert sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|----------|
| a. Sangat Setuju (SS) | = Skor 5 |
| b. Setuju (S) | = Skor 4 |
| c. Netral (N) | = Skor 3 |
| d. Tidak Setuju (TS) | = Skor 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju (STS) | = Skor 1 |

3.6.1 Uji Outer Model atau Model Pengukuran

Ghozali & Latan, 2019) Model pengukuran (*measurement model* atau *outer model*) menunjukkan bagaimana variabel manifes merepresentasikan variabel laten yang akan diukur. Validitas dan reliabilitas diuji dengan uji outer model. *Uji validitas convergen, uji validitas discriminant, dan uji reliabilitas* merupakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi outer model.

a. Uji Validitas Convergent

Uji validitas convergent dari *measurement (outer) model* digunakan untuk menguji validitas indikator dengan melihat masing-masing konstruk. *Validitas convergent* dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan korelasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara item score atau *component* dengan *construct score* yang dihitung dengan *PLS*. Uji *validitas convergent* indikator reflektif dengan program SmartPLS 3.0 dapat dilihat dari *loading factor* dan *Average Variance Extracted (AVE)*.

1) Loading Factor

Nilai *loading factor* menjadi kriteria dalam menilai *validitas convergent*. Jika dilihat dari *loading factor* maka ukuran model reflektif dikatakan bagus apabila nilai *loading factor* lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2019).

2) Average Variance Extracted (AVE)

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi *validitas convergent* adalah nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Jika nilai *AVE* harus lebih besar dari 0,5 maka variabel laten dianggap valid. Nilai *AVE* yang direkomendasikan harus lebih besar dari 0,5, yang menunjukkan bahwa setidaknya 50% varian indikator dapat dijelaskan (Ghozali & Latan, 2019).

b. Uji Discriminant Validity

Discriminant validity menyatakan bahwa *manifest variabel* dari berbagai konstruksi tidak boleh berkorelasi tinggi. Dengan menggunakan *indicator refleksi*, *validitas diskriminan* dapat dievaluasi dengan memeriksa nilai *cross loading* dari masing-masing variabel. Menurut Ghozali & Latan (2019), suatu indikator dikatakan memiliki *discriminant*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

validity yang baik jika nilai *cross loading* pada variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya.

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan konsistensi, presisi, dan akurasi instrumen dalam mengukur konstruk. Dengan menggunakan *SmartPLS*, *SEM-PLS* dapat mengukur reliabilitas konstruk menggunakan indikator refleksi dengan dua cara yaitu melihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70 menunjukkan bahwa konstruk tersebut reliabel (Ghozali & Latan, 2019).

3.6.2 Uji Inner Model atau Model Struktural

Pengujian *Inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikan, dan *R-square* dari model penelitian. *R-square* digunakan untuk mengevaluasi konstruk dependen untuk model struktural. *R-square* untuk variabel laten dependen dapat digunakan sebagai titik awal evaluasi model menggunakan PLS.

Dalam pengujian hipotesis, model struktural atau *inner model* digunakan untuk menentukan apakah variabel laten eksogen (independen) berpengaruh signifikan terhadap variabel laten endogen. Model kuat, moderate, dan lemah ditentukan berdasarkan nilai *R-square* masing-masing 0.75, 0.50, dan 0.25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient* yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai t_{hitung} . Signifikan parameter yang diestimasi memberikan informasi mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian kemudian membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Uji hipotesis ini menggunakan *SEM-PLS* dengan aplikasi *SmartPLS 3.0* menggunakan metode *resampling bootstrapping*. Nilai signifikan yang digunakan (*two-tailed*) t_{tabel} 1,65 (*significance level* =10%), t_{tabel} 1,96 (*significance level* =5%), t_{tabel} 2,58 (*significance level* =1%). (Ghozali & Latan, 2019)

Penelitian ini dengan tingkat keyakinan 95% atau taraf signifikansi yang ditentukan yaitu sebesar 5% (t_{tabel} 1,96) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$ 1,96), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, menandakan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,96) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menandakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

UIN SUSKA RIAU



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, Dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukk bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada desa diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada desa diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada desa diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada desa diwilayah Kecamatan Kuantan Tengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban yang terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan keadaan sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen saja, yakni Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, Dan Peran Perangkat Desa, hal ini memungkinkan terabaikannya keadaan lain yang dapat dijadikan variabel yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya dilakukan dalam lingkup Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk kecamatan/kelurahan lainnya.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa di wilayah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing diharapkan secara rutin memberikan informasi dana desa, laporan keuangan desa, dan hasil kerja dalam hal pengelolaan keuangan desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pertanggungjawaban kepada public agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini dan memperluas objek penelitian, pernyataan dalam kuesioner disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak terjadi multitafsir, peneliti juga dapat mengembangkan penelitian dengan metode kualitatif menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden agar memperoleh hasil yang lebih detail.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat 1-6 dan Terjemahan

Abdullah, M. H., & Samad, A. (2019). PENGARUH SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA (SISKEUDES) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan). *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 4(1). <https://doi.org/10.36549/ijis.v4i1.50>

Ardianti, P. A. R., & Suartana2, I. W. (2017). *I Wayan Ramantha 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia*. 1041–1054.

Afiansyah, M. A. (2020a). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1), 67–82. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>

Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.978>

Fatchuriza, M. (2020). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Kemampuan Kinerja Perangkat Desa Terhadap kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. 8(2), 27–41.

Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29–46.

Isnawan, fikri hendy, & Haryati, T. (2021). *Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat pada pengelolaan alokasi dana desa terhadap pembangunan desa*. 1(1).

Jah, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>

Jamaludin, I. (2020). Pengaruh Kepatuhan, Peran, Dan Pemahaman Perangkat Desa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak). *University Research Colloquim*, 5, 205–210.

Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>

Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>

Pabrianti. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. 10–45. [http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/2481%0Ahttp://repository.stiedewantara.ac.id/2481/3/BAB II.pdf](http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/2481%0Ahttp://repository.stiedewantara.ac.id/2481/3/BAB%20II.pdf)

Pedro Wisang, P. M., Mitani, W., Yulia Jaeng, W. M., Kesehatan No, J., Alok Timur, K., Sikka, K., & Tenggara Timur, N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Desa Nita dan Desa Lusitad). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(4), 365–385. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v2i4.1451>

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>

Rangkuti, L. E., & Novasari, D. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan). *Wahana Inovasi*, 8(2), 185–187. <http://www.betaraubd.com/2013/03>

Rindorindo, S., Tanor, L. A. O., & Pangkey, R. I. J. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2, 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>

Saragih, N. S., & Kurnia, D. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desakabupaten. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA*, 1–9.

Sari, N., & Andra Asmara, J. (2021). Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 1.

Setiana, D. N., & Yuliani, L. N. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquim*, 5, 205–210.

Sekmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.

Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.

Widyatama, A., Lola Novita, & Diarespati. (2022). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 122–129. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.140>

Yalti, M. E. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13746/>

Yasinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). The Role of Intellectual Capital To Economic Value Added (Empirical Study on Manufacturing Companies of Consumption Goods Sector). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara (i) Responden

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas skripsi saya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

Berkaitan dengan penelitian tersebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini dalam bentuk informasi yang benar sesuai yang dialami. Sesuai dengan kode etik penelitian saya akan menjaga kerahasiaan data yang responden berikan, hal ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah dimana hanya ringkasan dan hasil analisis yang akan dipublikasikan.

Akhir kata saya mengucapkan terimakasih atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuisisioner ini.

Hormat saya,

UIN SUSKA RIAU

Jurmaini Selpiy

NIM. 11970324361



KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saundara(i) untuk melengkapi daftar isian yang terdapat dibawah ini.

I. Identitas Responden

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Desa tempat bekerja :

Jabatan : ☐ Kepala Desa ☐ Bendahara Desa
☐ Sekretaris Desa ☐ Anggota BPD

Tingkat Pendidikan :

II. Petunjuk Pengisian

Berikut adalah daftar pernyataan tentang penelitian Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Bapak / Ibu / Saudara / I cukup memilih pada kolom jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu / Saudara / I dengan skala dari 1 sampai 5.

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. N : Netral
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

III. Persepsi Responden

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Penyusunan anggaran pemerintah desa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa.					
2.	Pembuatan RKP-Desa mengutamakan kepentingan publik dan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran					
3.	Pengajuan anggaran disertai dokumen perencanaan yang diajukan sebagai dasar penyusunan APB Desa.					
4.	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, efisisien dan sesuai peraturan perundang-undangan.					
5.	Evaluasi kinerja keuangan memperhatikan prinsip ekonomis, efektif dan efisien dari setiap program.					
6.	Pencatatan pendapatan, belanja dan pembiayaan didasarkan pada kelengkapan bukti/dokumen pelaksanaan anggaran.					
7.	Pelaporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					
8.	Laporan keuangan desa diperiksa oleh inspektorat dan pemerintah desa melakukan analisis laporan keuangan untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan anggaran.					
9.	Penyusunan anggaran pemerintah desa, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran.					

Sumber : (Arfiansyah, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SISTEM KEUANGAN DESA (X1)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Aplikasi Siskeudes mudah digunakan dan dipahami.					
2.	Aplikasi Siskeudes meringankan beban pekerjaan dalam pembuatan laporan keuangan desa.					
3.	Penggunaan aplikasi Siskeudes mengurangi resiko kesalahan pelaporan keuangan desa.					
4.	Aplikasi Siskeudes menghilangkan resiko penyimpangan dan menghindarkan dari manipulasi pertanggungjawaban belanja desa.					
5.	Aplikasi Siskeudes memiliki fitur-fitur layanan lengkap sesuai kebutuhan desa.					
6.	Aplikasi Siskeudes sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa.					
7.	Aplikasi Siskeudes memiliki pembaruan yang berkelanjutan.					
8.	Aplikasi Siskeudes dimanfaatkan secara benar dan digunakan secara berkala dan berkesinambungan.					
9.	Aplikasi Siskeudes digunakan secara terbuka dan akuntabel.					
10.	Aplikasi Siskeudes menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.					

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) (X2)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang.					
2.	Pemerintah desa memiliki struktur organisasi, tugas dan wewenang yang jelas.					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3.	Aset milik desa selalu disimpan ditempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.					
4.	Memiliki rencana pengelolaan dalam mengurangi resiko pelanggaran.					
5.	Pengeluaran uang pada pemerintahan desa selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran pada bukti pengeluaran kas.					
6.	Adanya otorisasi atas aktivitas transaksi					
7.	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif.					
8.	Selalu ada tindak lanjut dari setiap hasil temuan/ review dan saran yang diberikan oleh inspektorat atau BPD.					
9.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan anggaran desa secara berkala dan berkesinambungan.					

TRANSPARANSI (X3)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan desa dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial.					
2.	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi tentang laporan keuangan desa.					
3.	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan desa melalui internet (website).					
4.	Adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses rencana dan pengalokasian dana desa.					
5.	Adanya sarana publikasi rencana dan pengalokasian dana desa.					
6.	Masyarakat dapat memberikan kritik dan					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	saran terhadap rencana dan anggaran pengalokasian dana desa.					
7.	Masyarakat dilibatkan dalam rencana dan penganggaran pengalokasian dana desa.					
8.	Adanya peran masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan laporan dana desa.					
9.	Masyarakat percaya kepada pelaksanaan dan mengelolahan dana desa.					
10.	Masyarakat percaya kepala desa mampu bertanggung pada keja yang dilakukan.					

PERAN PERANGKAT DESA (X4)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses perencanaan penggunaan keuangan desa.					
2.	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang rancangan APBDesa kepada Kepala Desa dan /atau BPD.					
3.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.					
4.	Perangkat desa terkait menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APBDesa.					
5.	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang perubahan APBDesa.					
6.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa.					
7.	Perangkat desa terkait memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif.					



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Kuesioner Penelitian

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)										
No.	APKD.1	APKD.2	APKD.3	APKD.4	APKD.5	APKD.6	APKD.7	APKD.8	APKD.9	Total
1	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
6	5	4	4	4	4	4	5	4	5	39
7	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
8	5	4	4	5	4	4	5	4	5	40
9	5	5	4	4	5	5	5	5	4	42
10	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
11	4	4	4	4	4	5	4	5	4	38
12	5	5	5	5	4	4	5	4	5	42
13	4	4	5	5	5	4	4	4	3	38
14	5	5	4	4	4	5	5	5	4	41
15	4	5	4	5	4	4	5	5	5	41
16	4	4	5	5	4	4	4	5	4	39
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
25	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
26	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
27	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
28	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44
29	5	5	4	5	5	5	5	5	4	43
30	5	5	4	5	5	5	5	5	4	43
31	5	5	4	5	5	5	5	5	4	43
32	5	5	4	5	5	5	5	5	4	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
34	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
35	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
36	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
37	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
38	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
39	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
40	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42
41	4	4	4	5	4	4	5	5	4	39
42	4	4	4	5	4	4	5	5	4	39
43	4	4	4	5	4	4	5	5	4	39
44	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
45	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
46	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
47	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
48	4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
52	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
54	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
56	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
65	5	4	4	4	5	4	5	4	5	40
66	5	4	4	4	5	4	5	4	5	40
67	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
68	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
69	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39
70	5	4	4	4	5	4	5	4	4	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

71	5	4	4	4	5	4	5	4	5	40
72	5	4	4	4	5	4	4	4	4	38
73	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
74	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42
75	5	4	5	5	5	5	5	4	4	42
76	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
77	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
78	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
79	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
80	5	4	5	4	5	5	5	4	4	41
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
82	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
83	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
84	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
85	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
86	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
87	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
88	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
89	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
90	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
91	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
92	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
93	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
94	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
95	5	5	4	4	4	4	4	4	3	37
96	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
98	4	4	4	4	4	4	4	3	3	34
99	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
100	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
101	4	4	4	4	4	4	3	4	3	34
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
104	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
105	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
106	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
107	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
108	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

109	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
110	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
111	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
112	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
113	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
114	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
115	4	4	4	5	5	4	4	5	5	40
116	5	4	4	4	3	4	3	4	3	34
117	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
118	4	4	4	3	3	4	3	4	4	33
119	4	4	4	3	3	4	4	4	4	34
120	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34
121	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
122	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
127	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
129	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
130	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
131	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
132	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
133	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
134	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
135	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
136	5	5	5	4	5	5	5	4	4	42
137	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
138	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
139	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
140	4	4	4	5	4	4	5	4	5	39
141	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
142	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
143	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
144	4	4	4	5	4	4	5	4	4	38
145	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
146	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

147	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
148	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
149	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
151	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
153	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
157	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
158	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
159	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
160	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

Sistem Keuangan Desa (X1)											
No.	SKD.1	SKD.2	SKD.3	SKD.4	SKD.5	SKD.6	SKD.7	SKD.8	SKD.9	SKD.10	TOTAL
1	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	44
2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
6	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	40
7	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	43
8	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	43
9	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	35
10	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	33
11	3	3	3	4	4	5	5	4	3	4	38
12	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	32
13	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	33
14	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	33
15	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	40
16	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	43
17	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
18	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
19	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
20	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
22	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
23	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
24	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	46
25	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
26	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
27	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
28	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
29	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
30	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
31	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
32	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
33	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
34	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
35	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
36	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
37	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
38	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
39	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
40	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	45
41	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	37
42	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
43	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	38
44	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	37
45	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	36
46	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	35
47	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	33
48	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	35
49	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
50	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
51	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
52	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
53	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
54	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
55	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
56	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	46
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
60	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	48
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
65	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
66	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
67	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
68	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
69	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
70	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
71	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
72	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
73	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
75	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
76	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
77	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
78	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
82	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
83	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	41
84	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	41
85	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
86	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
87	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	41
88	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	42
89	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39
90	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	37
91	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	37
92	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
93	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	37
94	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
95	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
96	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
98	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
100	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
102	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
103	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
104	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
105	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
106	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
107	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
108	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
109	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
110	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
111	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
112	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
113	4	4	3	5	4	3	3	4	4	5	39
114	4	4	3	5	4	3	3	4	4	5	39
115	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
116	3	3	4	3	4	4	4	5	4	3	37
117	3	3	4	3	3	4	4	5	4	3	36
118	3	3	4	4	3	4	4	5	3	3	36
119	3	3	4	4	3	4	4	5	3	3	36
120	3	3	4	3	3	4	4	5	3	3	35
121	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
123	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
125	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
127	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
128	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
129	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	44
130	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
131	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
132	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
133	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
134	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

135	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
136	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	44
137	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
138	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
139	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
140	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
141	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
142	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
143	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
144	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	45
145	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
146	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
147	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
148	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
149	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
150	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
151	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
152	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
153	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
157	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
158	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
159	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
160	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)										
No.	SPIP.1	SPIP.2	SPIP.3	SPIP.4	SPIP.5	SPIP.6	SPIP.7	SPIP.8	SPIP.9	TOTAL
1	5	4	4	5	4	4	5	4	4	39
2	5	5	4	5	4	4	5	4	4	40
3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	31
4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	31
5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	39
6	3	3	3	4	4	3	4	4	4	32
7	3	3	3	4	4	3	4	4	4	32
8	3	3	3	3	4	4	3	4	3	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	5	5	5	4	5	5	5	5	5	44
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
11	5	4	4	4	5	5	5	5	5	42
12	5	5	4	4	5	4	4	5	5	41
13	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
14	3	3	4	4	5	4	4	5	4	36
15	3	3	3	3	4	4	3	4	4	31
16	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
25	4	5	5	4	5	4	5	4	5	41
26	4	5	5	5	5	4	5	4	5	42
27	4	5	5	5	5	4	5	4	5	42
28	4	5	5	5	5	4	5	4	5	42
29	4	5	5	4	5	4	5	4	5	41
30	4	5	5	4	5	4	5	4	5	41
31	4	5	5	4	5	4	5	4	5	41
32	4	5	5	4	5	4	5	4	5	41
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
34	3	3	4	3	4	3	3	4	4	31
35	3	3	4	4	4	3	3	4	4	32
36	3	4	4	4	4	3	3	4	4	33
37	4	3	4	4	4	4	3	4	4	34
38	4	3	4	4	4	3	3	4	3	32
39	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
40	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
41	4	4	5	4	4	4	4	4	5	38
42	4	4	5	4	4	4	4	4	5	38
43	4	3	5	4	4	4	4	3	5	36
44	4	4	5	4	4	4	4	3	5	37
45	4	3	5	4	4	4	4	4	5	37
46	4	3	5	4	4	4	4	4	5	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

47	4	3	5	4	4	4	4	4	5	37
48	4	3	5	4	4	4	4	4	5	37
49	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
50	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
51	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
52	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
53	4	4	5	4	5	5	5	5	5	42
54	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
55	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
56	4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
58	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
59	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
61	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
62	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
64	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
65	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
66	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
67	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
68	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
69	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
70	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
71	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
72	4	5	5	4	4	4	5	4	5	40
73	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
74	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
75	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
76	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
77	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
78	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
79	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
80	4	5	4	4	5	4	4	4	5	39
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
82	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
83	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
84	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

85	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
86	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
87	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
88	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
89	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
90	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
91	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
92	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
93	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
94	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
95	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
96	4	5	5	5	4	4	4	5	4	40
97	4	5	5	4	5	5	5	5	5	43
98	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
99	4	4	5	4	5	5	5	5	4	41
100	4	4	5	4	5	5	5	5	4	41
101	4	4	5	4	5	5	4	5	4	40
102	4	5	5	4	5	5	5	5	4	42
103	4	5	5	4	5	5	4	5	4	41
104	4	4	5	4	5	5	4	5	4	40
105	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
106	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
107	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
108	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
109	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
110	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
111	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
112	4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
113	4	5	5	5	5	4	4	4	5	41
114	4	5	5	5	5	4	4	4	5	41
115	4	5	5	5	4	4	5	4	5	41
116	5	5	5	5	4	3	3	4	5	39
117	5	5	5	5	4	3	3	4	5	39
118	5	5	5	5	4	3	3	4	5	39
119	5	5	5	5	4	3	3	4	5	39
120	5	5	5	5	4	3	3	4	5	39
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
122	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
124	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
125	3	3	4	3	4	4	4	4	4	33
126	3	3	4	3	4	2	4	4	4	31
127	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
128	4	4	4	4	4	2	4	4	4	34
129	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
130	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
131	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
132	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
133	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
134	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
135	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
136	4	4	5	4	5	4	4	4	4	38
137	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
138	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
139	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
140	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
141	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
142	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
143	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
144	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
146	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
147	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
148	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
149	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
151	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
152	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
153	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
154	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
155	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
156	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
157	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
158	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
159	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
160	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi (X3)											
No.	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	TOTAL
1	5	5	4	4	4	4	4	5	4	5	44
2	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
3	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	46
4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	45
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
6	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	45
7	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	45
8	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46
9	3	4	4	4	5	4	4	3	3	4	38
10	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	38
11	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
12	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	48
13	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	48
14	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	43
15	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	45
16	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	44
17	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
18	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
19	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
20	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
21	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
22	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
23	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
24	5	5	4	4	4	5	4	4	5	5	45
25	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
26	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
27	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
28	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
29	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
30	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
31	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
32	4	5	4	4	4	4	3	3	5	5	41
33	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
34	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
35	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
36	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
38	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
39	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
40	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	45
41	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
42	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
43	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
44	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
45	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
46	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
47	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
48	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	44
49	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
52	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
53	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
54	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
55	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	49
56	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	48
57	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
58	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
59	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
60	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	48
61	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
62	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
63	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
64	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	47
65	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	40
66	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	40
67	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	40
68	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	40
69	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
70	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
71	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
72	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	38
73	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
74	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

75	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
76	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36
77	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
78	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36
79	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36
80	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
81	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
83	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	36
84	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38
85	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
86	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	37
87	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	38
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
89	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
90	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
91	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
92	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
93	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
94	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
95	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
96	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	45
97	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
98	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	31
99	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	32
100	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
101	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
102	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	32
103	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	31
104	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	33
105	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	47
106	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
107	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
108	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
109	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	49
110	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
111	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	48
112	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

113	5	5	4	4	5	5	5	3	3	3	42
114	4	5	4	4	4	5	5	3	3	3	40
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
116	5	3	4	5	5	4	4	3	3	3	39
117	5	3	4	5	5	4	4	3	3	3	39
118	5	3	4	5	5	4	4	3	3	3	39
119	5	3	4	5	5	4	4	3	3	3	39
120	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	36
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
123	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
125	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
127	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
128	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
129	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
131	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
133	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
134	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
135	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
136	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
137	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
138	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
139	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
140	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
141	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
142	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	44
143	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
144	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
145	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
146	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
147	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
148	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
149	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
150	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

151	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
152	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	49
153	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	48
154	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
155	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
156	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
157	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	48
158	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
159	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	48
160	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49

Peran Perangkat Desa (X4)								
No.	PPD.1	PPD.2	PPD.3	PPD.4	PPD.5	PPD.6	PPD.7	TOTAL
1	4	5	4	4	4	5	4	30
2	4	4	4	4	4	5	4	29
3	4	4	4	4	4	5	4	29
4	4	4	4	4	4	5	4	29
5	4	4	4	4	4	5	4	29
6	5	4	4	4	4	5	4	30
7	5	4	4	4	4	5	4	30
8	5	4	4	4	4	5	4	30
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	4	5	5	5	5	5	5	34
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	5	5	5	5	5	5	5	35
16	4	4	5	5	5	5	5	33
17	4	4	5	5	5	5	4	32
18	4	4	5	5	5	5	4	32
19	4	4	5	5	5	5	4	32
20	4	4	5	5	5	5	4	32
21	4	4	5	5	5	5	4	32
22	4	4	5	5	5	5	4	32
23	4	4	5	5	5	5	4	32
24	4	4	5	5	5	5	4	32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	5	4	4	5	5	5	4	32
26	5	4	4	5	5	5	4	32
27	5	4	4	5	5	5	4	32
28	5	4	4	5	5	5	4	32
29	5	4	4	5	5	5	4	32
30	5	4	4	5	5	5	4	32
31	5	4	4	5	5	5	4	32
32	5	4	4	5	5	5	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	4	4	4	4	4	4	4	28
36	4	4	4	4	4	4	4	28
37	4	4	4	4	4	4	4	28
38	4	4	4	4	4	4	4	28
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	4	4	4	4	4	4	4	28
41	4	4	4	4	5	4	4	29
42	4	4	4	4	5	4	4	29
43	4	4	4	4	5	4	4	29
44	4	4	4	4	5	4	4	29
45	4	4	4	4	5	4	4	29
46	4	4	4	4	5	4	4	29
47	4	4	4	4	5	4	4	29
48	4	4	4	4	5	4	4	29
49	4	5	4	4	5	4	4	30
50	4	5	4	4	5	4	4	30
51	4	5	4	4	5	4	4	30
52	4	5	4	4	5	4	4	30
53	4	5	4	4	5	4	4	30
54	4	5	4	4	5	4	4	30
55	4	5	4	4	5	4	4	30
56	4	5	4	4	5	4	4	30
57	5	5	5	5	5	5	5	35
58	5	5	5	5	5	5	5	35
59	5	5	5	5	4	5	5	34
60	4	5	5	5	5	5	5	34
61	4	5	5	5	4	5	5	33
62	4	5	5	5	4	5	5	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

63	4	5	5	5	5	5	5	34
64	4	5	5	5	4	5	5	33
65	4	4	4	4	4	4	4	28
66	4	4	4	4	5	4	4	29
67	4	4	4	4	4	4	4	28
68	4	4	4	4	5	4	4	29
69	4	4	4	4	4	4	4	28
70	4	4	4	4	5	4	4	29
71	4	4	4	4	5	4	4	29
72	5	4	4	4	4	4	4	29
73	5	5	5	5	4	4	4	32
74	5	5	5	5	4	4	4	32
75	5	5	5	5	4	4	4	32
76	5	5	5	5	4	4	4	32
77	5	5	5	5	4	4	4	32
78	5	5	5	5	4	4	4	32
79	5	5	5	5	4	4	4	32
80	5	5	5	5	4	4	4	32
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	5	4	5	4	5	5	5	33
83	4	4	4	4	5	5	5	31
84	4	4	4	4	5	5	5	31
85	4	3	4	4	5	5	5	30
86	5	3	4	4	4	5	5	30
87	4	4	4	4	4	5	5	30
88	4	3	4	4	5	4	4	28
89	4	3	4	5	4	4	3	27
90	4	4	4	4	4	4	3	27
91	4	4	4	4	4	4	3	27
92	4	5	4	4	4	4	3	28
93	4	5	5	4	4	4	3	29
94	4	4	4	4	4	4	3	27
95	4	4	4	4	4	4	3	27
96	4	4	5	5	5	4	3	30
97	4	4	4	4	4	4	4	28
98	4	4	4	4	3	4	4	27
99	4	4	4	4	3	4	3	26
100	4	4	4	4	3	4	4	27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

101	4	4	4	4	4	4	4	28
102	4	4	4	4	4	4	4	28
103	4	4	4	4	4	4	4	28
104	4	3	4	4	4	4	4	27
105	4	4	4	3	3	4	4	26
106	3	3	3	3	3	4	4	23
107	3	3	4	4	3	3	3	23
108	3	4	4	4	4	4	3	26
109	3	3	4	4	3	4	4	25
110	3	3	4	4	3	4	3	24
111	3	3	4	4	3	4	3	24
112	3	5	4	4	4	4	4	28
113	5	5	5	5	5	5	4	34
114	5	5	5	5	5	5	5	35
115	4	5	4	4	4	4	4	29
116	4	4	4	3	3	3	4	25
117	3	3	4	3	3	3	3	22
118	4	3	4	3	3	3	4	24
119	4	4	4	3	3	3	3	24
120	3	3	4	3	3	3	4	23
121	4	4	4	4	4	4	4	28
122	4	4	4	4	4	4	4	28
123	4	4	4	4	4	4	4	28
124	4	4	4	4	4	4	4	28
125	4	4	4	4	4	4	4	28
126	4	4	4	4	4	4	4	28
127	4	4	4	4	4	4	4	28
128	4	4	4	4	4	4	4	28
129	4	4	5	5	4	5	4	31
130	4	4	5	5	4	5	4	31
131	4	4	5	5	4	5	4	31
132	4	4	5	5	4	5	4	31
133	4	4	5	5	4	5	4	31
134	4	4	5	5	4	5	4	31
135	4	4	5	5	4	5	4	31
136	4	4	5	5	4	5	4	31
137	4	4	4	5	5	4	4	30
138	4	4	4	5	5	4	4	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

139	3	3	4	4	4	4	3	25
140	4	3	4	5	4	4	3	27
141	4	4	4	4	3	4	4	27
142	4	4	4	4	3	4	3	26
143	4	3	4	4	4	4	3	26
144	4	4	4	5	5	4	4	30
145	5	5	5	5	5	4	4	33
146	5	5	5	5	5	4	4	33
147	5	5	5	5	5	4	4	33
148	5	5	5	5	5	4	4	33
149	5	5	5	5	5	4	4	33
150	5	5	5	5	5	4	4	33
151	5	5	5	5	5	4	4	33
152	5	5	5	5	5	4	4	33
153	5	5	5	5	5	5	5	35
154	5	5	5	5	5	5	5	35
155	5	5	5	5	5	5	5	35
156	5	5	5	5	5	5	5	35
157	5	5	5	5	5	5	5	35
158	5	5	5	5	5	5	5	35
159	5	5	5	5	5	5	5	35
160	5	5	5	5	5	5	5	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	160	100%
Kuesioner yang terisi	160	100%
Kuesioner yang tidak terisi	0	0%
Kuesiner yang dapat diolah	160	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

LAMPIRAN 4

Karakteristik Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	124	77.5%
	b. Perempuan	36	22.5%
	Jumlah	160	100%
2	Tingkat Pendidikan		
	a. SLTA	106	66.25%
	b. D3	11	6.88%
	c. S1	40	25%
	d. S2	3	1.87%
	Jumlah	160	100%
3	Jabatan		
	a. Kepala Desa	20	12.5%
	b. Sekretaris Desa	20	12.5%
	c. Bendahara Desa	20	12.5%
	d. Anggota BPD	100	62.5%
	Jumlah	160	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

LAMPIRAN 5

Uji Convergent Validity

Loading Factor

	APKD (Y)	SKD (X1)	SPIP (X2)	T (X3)	PPD (X4)
APKD.1	0.729				
APKD.2	0.798				
APKD.3	0.803				
APKD.4	0.748				
APKD.5	0.826				
APKD.6	0.852				
APKD.7	0.713				
APKD.8	0.732				
APKD.9	0.725				
SKD.1		0.737			
SKD.2		0.799			
SKD.3		0.806			
SKD.4		0.774			
SKD.5		0.747			
SKD.6		0.735			
SKD.7		0.740			
SKD.8		0.702			
SKD.9		0.714			
SKD.10		0.742			
SPIP.1			0.739		
SPIP.2			0.703		
SPIP.3			0.721		
SPIP.4			0.705		
SPIP.5			0.787		
SPIP.6			0.775		
SPIP.7			0.738		
SPIP.8			0.761		
SPIP.9			0.740		
T.1				0.701	
T.2				0.758	
T.3				0.708	
T.4				0.755	
T.5				0.703	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T.6				0.717	
T.7				0.705	
T.8				0.732	
T.9				0.804	
T.10				0.822	
PPD.1					0.733
PPD.2					0.705
PPD.3					0.805
PPD.4					0.858
PPD.5					0.715
PPD.6					0.750
PPD.7					0.710

Sumber: Data Output SmartPLS4, 2023

LAMPIRAN 6

Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.595
Sistem Keuangan Desa (X1)	0.563
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0.550
Transparansi (X3)	0.550
Peran Perangkat Desa (X4)	0.571

Sumber: Data Output SmartPLS4, 2023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 7

Uji Discriminant Validity Cross Loading

No. Item	APKD (Y)	SKD (X1)	SPIP (X2)	T (X3)	PPD (X4)
APKD.1	0.729	0.508	0.316	0.400	0.357
APKD.2	0.798	0.314	0.428	0.536	0.381
APKD.3	0.803	0.596	0.429	0.422	0.425
APKD.4	0.748	0.453	0.394	0.599	0.350
APKD.5	0.826	0.627	0.590	0.302	0.553
APKD.6	0.852	0.555	0.622	0.317	0.563
APKD.7	0.713	0.581	0.319	0.514	0.381
APKD.8	0.732	0.267	0.410	0.571	0.373
APKD.9	0.725	0.473	0.462	0.548	0.307
SKD.1	0.284	0.737	0.197	0.039	0.271
SKD.2	0.658	0.799	0.304	0.256	0.215
SKD.3	0.485	0.806	0.407	0.193	0.168
SKD.4	0.619	0.774	0.341	0.100	0.345
SKD.5	0.497	0.747	0.212	0.158	0.465
SKD.6	0.306	0.735	0.246	0.238	0.015
SKD.7	0.441	0.740	0.420	0.293	0.114
SKD.8	0.305	0.702	0.416	0.236	-0.096
SKD.9	0.424	0.714	0.127	0.414	0.048
SKD.10	0.493	0.742	0.074	0.355	0.232
SPIP.1	0.320	0.168	0.739	0.251	0.331
SPIP.2	0.361	0.325	0.703	0.048	0.135
SPIP.3	0.265	0.048	0.721	0.158	0.042
SPIP.4	0.335	0.157	0.705	0.384	0.123
SPIP.5	0.609	0.444	0.787	0.198	0.484
SPIP.6	0.447	0.237	0.775	0.239	0.430
SPIP.7	0.505	0.393	0.738	0.295	0.289
SPIP.8	0.400	0.190	0.761	0.416	0.221
SPIP.9	0.428	0.266	0.740	0.233	0.254
T1	0.198	0.038	0.253	0.701	0.045
T2	0.496	0.173	0.411	0.758	0.322
T3	0.272	-0.051	0.092	0.708	-0.019
T4	0.463	0.192	0.418	0.755	0.149
T5	0.261	0.000	0.096	0.703	0.136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

T.6	0.405	0.094	0.232	0.717	0.147
T.7	0.345	0.129	0.196	0.705	0.042
T.8	0.414	0.255	0.041	0.732	0.178
T.9	0.607	0.469	0.356	0.804	0.361
T.10	0.609	0.478	0.211	0.822	0.306
PPD.1	0.260	0.074	0.177	0.055	0.733
PPD.2	0.363	0.205	0.345	0.295	0.705
PPD.3	0.435	0.254	0.407	0.177	0.805
PPD.4	0.489	0.324	0.389	0.220	0.858
PPD.5	0.425	0.015	0.278	0.346	0.715
PPD.6	0.448	0.262	0.173	0.182	0.750
PPD.7	0.351	0.209	0.180	0.084	0.710

Sumber: Data Output SmartPLS4, 2023

LAMPIRAN 8

Uji Reliabilitas

Nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	0.929	0.914
Sistem Keuangan Desa (X1)	0.928	0.915
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0.917	0.899
Transparansi (X3)	0.924	0.912
Peran Perangkat Desa (X4)	0.903	0.875

Sumber: Data Output SmartPLS4, 2023

LAMPIRAN 9

Uji Inner Model atau Model Struktural

Nilai R Square

Variabel Endogen	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0.719	0.712



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 10

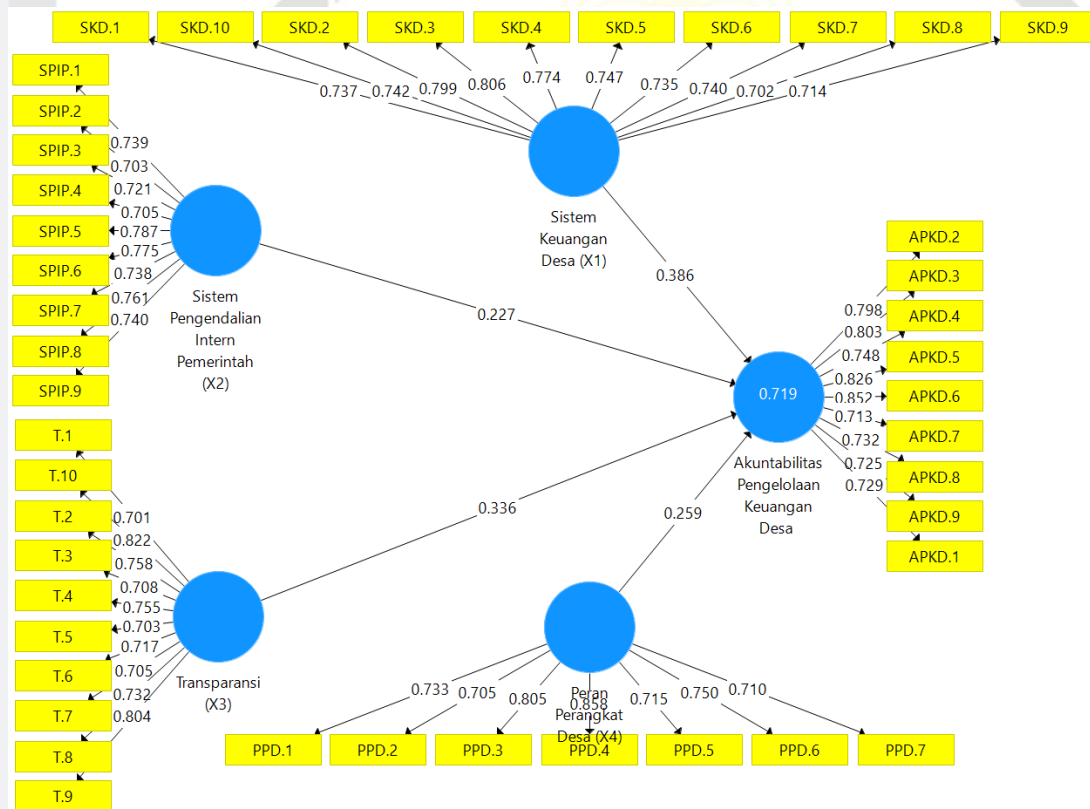
Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 -> Y	0.386	0.383	0.039	9.961	0.000
X2 -> Y	0.227	0.228	0.043	5.280	0.000
X3 -> Y	0.336	0.334	0.049	6.914	0.000
X4 -> Y	0.259	0.259	0.045	5.820	0.000

Sumber: Data Output SmartPLS4, 2023

LAMPIRAN 11

Skema Penelitian





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 12

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3149/Un.04/F. VII/PP.00.9/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 06 Juni 2023 M
17 Zulqaidah 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Jurmaini Selpiy
NIM. : 11970324361
Jurusan : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, Transparansi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di
Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)". Untuk itu
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57080
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-3149/Un.04/F.VII/PP.00.9/05/2023 Tanggal 6 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | JURMAINI SELPIY |
| 2. NIM / KTP | : | 11970324361 |
| 3. Program Studi | : | AKUNTANSI |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH SISTEM KUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, TRANSPARANSI, DAN PERAN PERANGKAT DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. DESA BANDAR ALAI KARI 2. DESA PULAU KEDUNDUNG 3. DESA PULAU ARO 4. DESA SEBERANG TALUK 5. DESA PULAU BARU 6. DESA KOTO TUO 7. DESA KOPAH 8. DESA MUNSALO KOPAH 9. DESA SAWAH 10. DESA KOTO TALUK 11. DESA KOTO KARI 12. DESA PINTU GOBANG KARI 13. DESA JAKE 14. DESA PULAU GODANG KARI 15. DESA JAYA KOPAH 16. DESA BERINGIN TALUK 17. DESA SITORAJO KARI 18. DESA SEBERANG TALUK HILIR 19. DESA TITIAN MODANG KOPAH 20. DESA PULAU BANJAR KARI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

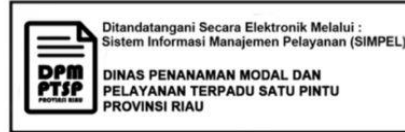
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juni 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : https://dpmtsp.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 165/DPMTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/57080 Tanggal 09 JUNI 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	JURMAINI SELPIY
NIM	:	11970324361
Jurusan	:	AKUNTANSI
	:	FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	PEKANBARU
Judul Penelitian	:	"PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, TRANSPARANSI, DAN PERAN PERANGKAT DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DESA BANDAR ALAI KARI, DESA PULAU KEDUNDUNG, DESA PULAU ARO, DESA SEBERANG TALUK, DESA PULAU BARU, DESA KOTO TUO, DESA KOPAH, DESA MUNSALO KOPAH, DESA SAWAH, DESA KOTO TALUK, DESA KOTO KARI, DESA PINTU GOBANG KARI, DESA JAKE, DESA PULAU GODANG KARI, DESA JAYA KOPAH, DESA BERINGIN TALUK, DESA SITORAJA KARI, DESA SEBERANG TALUK HILIR, DESA TITIAN MODANG KOPAH, DESA PULAU BANJAR KARI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,**

JHON PITTE ALSI, S. IP
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
 Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>
 TELUK KUANTAN

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 13

Tanda Terima Kuesioner

TANDA TERIMA KUESIONER

Nama : Jurmaini Selpiy
 NIM : 11970324361
 Jurusan : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Adalah benar telah menyebarkan kuesioner yang berjudul “**Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi)**” sejak Juni sampai dengan Juli 2023.

Demikian tanda terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TANDA TERIMA KUESIONER

Nama Desa : <u>KOTO TUO</u> Tanggal : <u>04-JULI-2023</u>  (..... <u>MAHENDRA</u>)	Nama Desa : <u>Tujan Modang</u> Tanggal : <u>04-07-2023</u>  (..... <u>YANTO</u>)
Nama Desa : <u>Kopah</u> Tanggal : <u>04 Juli 2023</u>  (..... <u>PUTRA</u>)	Nama Desa : <u>Bengin Taluk</u> Tanggal : <u>05-07-2023</u>  (..... <u>ERI YANTO</u>)
Nama Desa : <u>PULAUARO</u> Tanggal : <u>05 JULI 2023</u> an. Kaur Kevangan  (..... <u>ARIEFUDIN</u>)	Nama Desa : <u>Pulau Kedundung</u> Tanggal : <u>10-07-2023</u>  (..... <u>Adianto</u>)
Nama Desa : <u>KOTO TALUK</u> Tanggal : <u>5 JULI 2023</u>  (..... <u>HARIS ROSYADI</u>)	Nama Desa : <u>JAKE</u> Tanggal : <u>10 Juli 2023</u>  (..... <u>RENDI</u>)

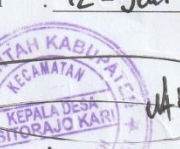


Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Desa : <u>SEBERANG TALUK HILIR</u> Tanggal : <u>11 JULI 2023</u>  (Diki Julianto, A.Md.)	Nama Desa : <u>Pulau Gadang kari</u> Tanggal : <u>11 Juli 2023</u>  (Ivan yandri)
Nama Desa : <u>PULAU BANJAR KARI</u> Tanggal : <u>11-JULI-2023</u>  (Suprihman)	Nama Desa : <u>PINTU GOBANG</u> Tanggal : <u>11 juli 2023</u>  (Zul Putra)
Nama Desa : <u>SEBERANG TALUK</u> Tanggal : <u>12 - JULI - 2023</u>  (Ediko ARIANDO, SE)	Nama Desa : <u>Koto kari</u> Tanggal : <u>12 -Juli - 2023</u>  (Aroiman)
Nama Desa : <u>SITORAJU KARI</u> Tanggal : <u>12 - JULI 2023</u>  (Dodi KURNIAWAN)	Nama Desa : <u>DESA SAWAH</u> Tanggal : <u>12 - JULI - 2023</u>  (ROZA MAEDIANTI, S.Sos)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Desa : <u>BANDAR ALAI KARI</u> Tanggal : <u>25 JULI 2023</u>   (..... LAILA TUSTIFA)	Nama Desa : <u>JAYA</u> Tanggal : <u>25 JULI 2023</u>   (..... HENDRIC GUSRI TONDOG)
Nama Desa : <u>Munsalo Kopah</u> Tanggal : <u>25 Juli 2023</u>   (..... DESRI SUFANTO A.M.D.)	Nama Desa : <u>Pulau Baru</u> Tanggal : <u>25 Juli 2023</u>   (..... M. A. H. FUDIN KEPALA DESA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

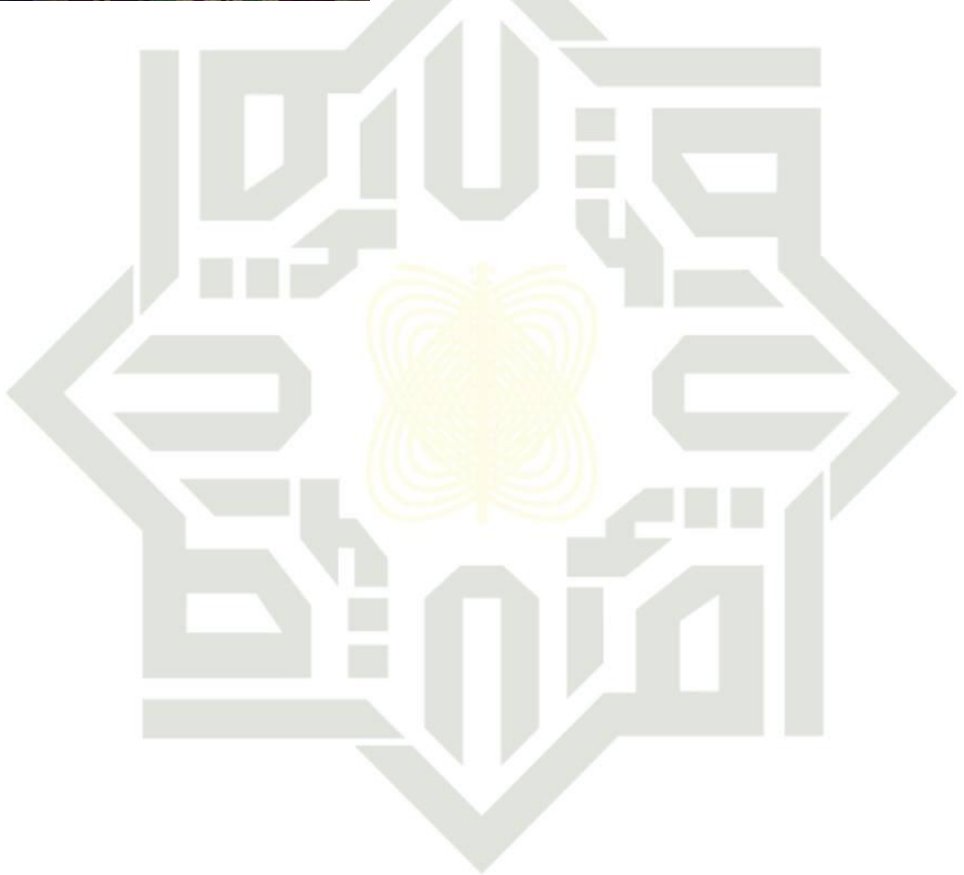
LAMPIRAN 14

BUKTI DOKUMENTASI PENGELUARAN KAS DANA DESA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 15

Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 16

Berita Terkait

Korupsi Dana Desa, Kades Sako Divonis 4,5 Tahun Penjara

Selasa, 21 Januari 2020 20:00 WIB

Bagikan Halaman Ini :



PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Desa (Kades) Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Andika, dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Andika terbukti melakukan korupsi dana desa yang merugikan negara Rp 576.652.000.

[Home](#) / [Berita](#) / [Hukum](#)

Senin, 09 Januari 2023 09:23 WIB

Waduh! Kades di Kuansing Tilap BLT

Penulis: **Wirman Susandi**

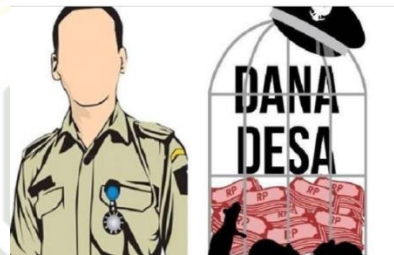


Ilustrasi BLT. (foto: int)

Terkait Dana Desa, Oknum Kades di Kuansing Menghilang

 Jekha Saqban Saputra
Kamis, 27 Januari 2022 10:15 WIB

1,058 view



TELUKKUANTAN – Seorang oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tilap dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2022. Bahkan, oknum Kades tersebut menilap dana BLT sebanyak empat bulan.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Suhardiman Amby prihatin dengan kondisi ini. Ia mengaku sudah menginstruksikan Inspektorat Kuansing untuk melakukan pembinaan terhadap oknum Kades tersebut.

"Ini tugas pertama yang harus diselesaikan oleh Plt Kepala Inspektorat yang baru saja dilantik. Kita minta, kasus ini diselesaikan secara internal terlebih dahulu," ujar Suhardiman pada Jumat (6/1/2023) sore, usai pelantikan empat pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Kuansing.